



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN



20
20

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2020

Penyusun Buku Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tahun 2020

Penanggung Jawab :

Jumeri, S.TP, M.Si

Tim Penyusun :

Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Dr. Muhammad Hasbi

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd

Drs. Mulyatsyah, M.M.

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si

Dr. Samto

Nandana Aditya Bhaswara, S.ST., M.M.

Zimmy Zulkarnaen Iman, S.E., M.M.

Dr. Tora Akadira

Nafis Khairul Huda, S.Kom

Kontributor :

Diana Sufa Rahmawati, S.E., M.A .

Finna Rizqina, S.H., M.A .

Djunaha Widyawati, M.A .

Epi Sopiah Nur, S.E.

Dini Azizah, S.PSi

Eulis Kuraesin, S.Sos

Samsudin, S.Pd.

Sri Nurhajati, S.E.

K. Benny Susanto, S.E.

Varian Geni Kusuma, S.Kom

Aip Saepudin , S.E., S.Pd.

Sudarman

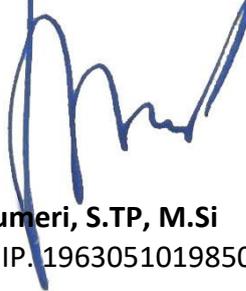
KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan pertanggungjawaban sekaligus menyampaikan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. LAKIP ini berisi diskripsi dan analisis capaian kinerja Tahun 2020 serta kesimpulan dan rekomendasi untuk perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, perencana dan pelaksana program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pihak pemangku kepentingan pendidikan maupun masyarakat umum.

Jakarta,
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,



Jumeri, S.TP, M.Si

NIP. 196305101985031019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilakukan berbagai program dengan anggaran sebesar Rp4.812.589.293.000. dengan daya serap sebesar Rp4.675.871.795.073 atau 97,16%.

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen memiliki 6 (enam) sasaran program yang didukung 16 Indikator Kinerja Program (IKP). Sasaran Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun.

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 3 IKP yaitu :

- a. Meningkatnya Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun).

Target Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun) adalah sebesar 66,49 %, tercapai 67,59 %, sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 101,65 %. Pencapaian target ini didukung dengan adanya program Bantuan Operasional PAUD dan juga mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD.

- b. Jumlah Kab/Kota dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi).

Target Kab/Kota dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi) sebanyak 6 Kab/Kota dan tercapai 6 Kab/Kota sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 100%.

Pada tahun 2020 ini belum dilakukan pengukuran scorecard, oleh karena itu untuk mengukur capaian ini menggunakan pendekatan rapor mutu pendidikan tahun 2019.

- c. Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi).

Target Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi) sebanyak 6 Provinsi dan tercapai 9 Provinsi sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 150%.

Pada tahun 2020 ini belum dilakukan pengukuran scorecard, oleh karena itu untuk mengukur capaian ini menggunakan pendekatan rapor mutu pendidikan tahun 2019.

2. Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 2 IKP yaitu :

- a. Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi).

Pada Tahun 2020 belum ada target Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi) pada Renstra Tahun 2020 – 2024. Adanya pandemic covid dan dinamika perubahan kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan pengukuran scorecard tertunda di tahun 2021.

- b. Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
Tahun 2020 belum terdapat target pada IKK Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak di Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020 – 2024. Sementara hingga akhir tahun 2024 memiliki target 10.000 sekolah penggerak. Langkah awal telah dilakukan pada Tahun 2020 meliputi pemetaan sekolah, seleksi pemerintah daerah yang akan menjadi lokus sekolah penggerak dan seleksi sekolah yang akan menjadi sekolah penggerak.

3. Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 3 IKP yaitu :

- a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan.

Target tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan sebesar 58,68% dan tercapai 52,80 %, sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 89,98%. Pengukuran capaian indikator ini menggunakan data hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat PAUD. Indikator ini tidak bisa mencapai target karena adanya kondisi luar biasa pandemi yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar tatap muka tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan survey nilai perkembangan anak sulit dilaksanakan karena memerlukan pengamatan langsung oleh guru.

- b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum.

Target siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 57,2 % dan tercapai 75,80 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 132,51 %. Karena pelaksanaan Asesmen Kompetensi Literasi ini baru akan dilaksanakan Tahun 2021, maka untuk mengukur capaian Tahun 2020 ini digunakan pendekatan menggunakan nilai ujian nasional untuk jenjang SMP dan SMA sedangkan jenjang SD menggunakan nilai AKSI.

- c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum.

Target siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 26,5 % dan tercapai 17,43 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 65,77 %. Karena pelaksanaan Asesmen Kompetensi Numerasi ini baru akan dilaksanakan Tahun 2021, maka untuk mengukur capaian Tahun 2020 ini digunakan pendekatan menggunakan nilai ujian nasional untuk jenjang SMP dan SMA sedangkan jenjang SD menggunakan nilai AKSI.

4. Meningkatnya Karakter Peserta Didik

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 2 IKP yaitu :

- a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (AKSI).

Target satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (AKSI) sebesar 30 % dan tercapai 36,73 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap

target adalah sebesar 122,43 %. Pencapaian target ini dilakukan dengan pendekatan holistik integratif. Pendekatan ini antara lain dengan melakukan penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini, melakukan penguatan ekstrakurikuler berupa kegiatan Kemah Kerja, dan mendorong sekolah untuk menyediakan sarana protokol kesehatan seperti pengadaan tempat cuci tangan di sekolah selama masa pandemi.

- b. Persentase siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum) Target siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum) sebesar 57,2 % dan tercapai 61,21 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target adalah sebesar 107,1%. Untuk mengukur capaian nilai survey karakter ini digunakan rapor mutu pendidikan yang khusus terkait dengan penilaian karakter siswa seperti tenggang rasa, menghargai orang lain, kerukunan, sportivitas, sopan santun, budaya antri, peduli lingkungan, bebas dari narkoba, dan berani mengakui kesalahan.

5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 4 IKP yaitu :

- a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkannya tepat waktu. Target satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkannya tepat waktu sebesar 50 % dan tercapai 98,45 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target adalah sebesar 196.90 %. Keberhasilan pencapaian target ini karena pelaporan penggunaan BOS oleh satuan pendidikan penerima BOS telah menjadi salah satu syarat dalam penyaluran BOS tahap berikutnya.
- b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai. Target satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai sebesar 1,8 % dan tercapai 52,82 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 2.934,44 %. Keberhasilan capaian ini karena sejak tahun 2019 telah dilakukan *piloting* untuk penerapan pembelanjaan BOS secara Non Tunai di beberapa Kota dan pada tahun 2020 ini telah disosialisasikan pembelanjaan BOS melalui *platform* SIPLAH yang dikembangkan oleh Biro Umum Kemendikbud. *Baseline* target untuk indikator ini memerlukan penyesuaian karena ternyata *platform* SIPLAH sudah digunakan oleh sebagian besar sekolah.
- c. Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan. Target prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan sebesar 55 % dan tercapai 56,20 % sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target adalah sebesar 102,18 %. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan capaian IKP ini karena adanya sosialisasi yang intensif kepada pemangku kepentingan di daerah dalam hal perencanaan bidang pendidikan.

- d. Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan.
Dari target 95,20% tercapai sebesar 95,92%, sehingga ketercapaian IKK ini adalah 100,75%. Berdasarkan hasil data rapor dapodik yang tercantum dalam <http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id> dengan rincian untuk persentase rapor dapodik yang akurat sebesar 92,03 %, persentase rapor dapodik yang terbaru sebesar 98,16%, dan persentase rapor dapodik yang berkelanjutan sebesar 97,58%.

6. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas.

Keberhasilan sasaran program ini diketahui melalui pencapaian 2 IKP yaitu :

- a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB.

Dari target rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB telah tercapai sesuai dengan target. Ketercapaian target IKK ini mencapai 100,00%.

Indikator predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2020 merupakan hasil penilaian penerapan akuntabilitas mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pada 2020 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan nilai 75,13 dengan predikat SAKIP masuk dalam kategori BB. Dari 69 Satker terdapat 27 Satker masuk dalam kategori A, 31 Satker masuk dalam kategori BB, 10 Satker masuk dalam kategori B serta 1 Satker masih dipredikat CC. Hasil rata-rata predikat SAKIP Satker adalah BB.

- b. Jumlah Satker yang dibina menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Target Satker yang dibina menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebanyak 11 Satker dan tercapai 13 Satker sehingga ketercapaian IKP ini terhadap target sebesar 118,18 %.

Pada 2020 tim RBI Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen selaku aksesor unit utama melakukan pembinaan dan seleksi LKE ZI-WBK/WBBM semua satker. Dari 69 satker yang dibina menghasilkan 10 satuan kerja berpredikat WBK pada tahun 2019, dan 3 satker berpredikat ZI-WBK di tahun 2020, sehingga total terdapat 13 satker. Penetapan Satker yang meraih predikat ZI WBK adalah satker yang memenuhi nilai minimal komponen pengungkit sebagai berikut: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas.

Perlu ditambahkan pula terdapat perubahan struktur organisasi dan revisi anggaran di tahun 2020 pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mulai berjalan pada bulan April. Akibat dari restrukturisasi ini, terdapat anggaran Direktorat SMK yang telah terpakai di bulan Januari sampai dengan Maret, masih menjadi catatan anggaran yang digunakan oleh Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebesar Rp. 139.808.813.000 sebagai data sebelum *cut off*. Direktorat SMK kemudian bergabung ke dalam Direktorat Jenderal Vokasi. Selain itu Direktorat PAUD yang

sebelumnya memiliki Direktorat Jenderal sendiri bergabung ke dalam Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan membawa anggaran sebesar Rp. 294.274.096.000 di TA 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Kerangka Kelembagaan.....	11
E. Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	20
B. Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	21
C. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pada Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	21
D. Meningkatnya Karakter Peserta Didik	22
E. Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel Pada Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	23
F. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang Berkualitas	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024	1
Tabel 1. 2 Jumlah ASN Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Tahun 2020	12
Tabel 1. 3 Kondisi Ruang Kelas	16
Tabel 1. 4 Ketersediaan Perpustakaan di Sekolah	17
Tabel 1. 5 Ketersediaan Laboratorium IPA di Sekolah	17
Tabel 3. 1 Capaian IKP Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen	25
Tabel 3. 2. Instrumen survey pemanfaatan neraca pendidikan daerah	41
Tabel 3. 3 Capaian Satker ZI-WBK	46
Tabel 3. 4 Perbandingan jumlah satker ZI-WBK 5 tahun	46
Tabel 3. 5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Persatker Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	48
Tabel 3. 6 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perbandingan APK PAUD dengan Negara-Negara Lain	13
Grafik 1. 2 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia	14
Grafik 1. 3 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik	15
Grafik 3. 1 Capaian Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB yang Pernah Mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 Tahun)	27
Grafik 3. 2 Capaian Jumlah Kab/Kota Dengan Nilai Score Card Minimum 75 (Kategori Tinggi).....	28
Grafik 3. 3 Capaian Jumlah Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75.....	29
Grafik 3. 3 Capaian Persentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun Berkembang Sesuai Harapan	31
Grafik 3. 4 Capaian Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	32
Grafik 3. 5 Capaian Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	34
Grafik 3. 6 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	35
Grafik 3. 7 Persentase siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum).....	37
Grafik 3. 8 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu.....	38
Grafik 3. 9 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Melakukan Penerapan BOS-Non-Tunai.	40
Grafik 3. 10 Capaian Persentase Prov/Kab/Kota yang Mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai Dasar Pengambilan Keputusan.....	41
Grafik 3. 11 Capaian Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan	43
Grafik 3. 12 Persentase Alokasi Anggaran Per Satker Tahun 2020.....	47
Grafik 3. 13 Alokasi dan Realisasi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2018 s.d 2020	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen	12
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) adalah 'Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.'

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

Perumusan tujuan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Keterkaitan antara tujuan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen dan sasaran program yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Program	
1	Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	SP.3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
2	Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik	SP.2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
		SP.3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Tujuan	Sasaran Program	
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	SP.3.3	Meningkatnya Karakter Peserta Didik
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP.1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
		SP.3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah

(Sumber: Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020 -2024)

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum untuk penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- b. perumusan standar peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- g. perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara teknis dilakukan oleh lembaga unit eselon II dibawahnya yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta pembinaan jabatan fungsional widyaprada dan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pembinaan jabatan fungsional widyaprada;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- h. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3. Direktorat Sekolah Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.



Fungsi Direktorat Sekolah Dasar adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4. Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.



Fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

5. Direktorat Sekolah Menengah Atas

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.



Fungsi Direktorat Sekolah Menengah Atas adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

6. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.



Fungsi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi LPMP adalah:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

8. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas)

PP PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, PP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

9. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas)

BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:

- a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

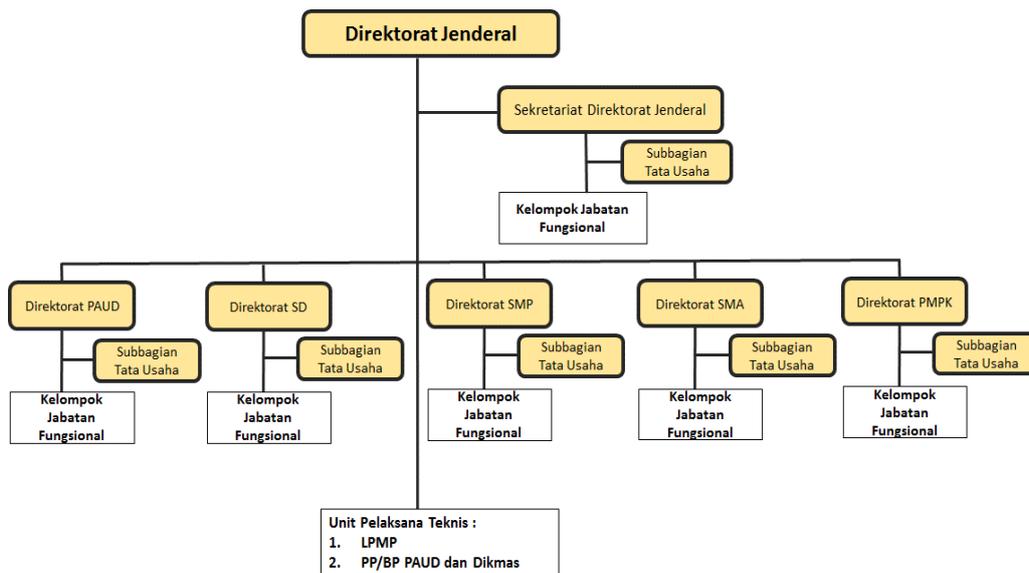
D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud;
- 2) Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen dalam melaksanakan program-programnya; dan
- 3) Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Secara struktural, Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen membawahi 1 Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 Direktorat Teknis, 34 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), 2 Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) dan 27 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) sebagaimana bagan di bawah ini:

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen



(Sumber: Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2024)

Setelah adanya perubahan struktur organisasi yaitu dengan bergabungnya Direktorat PAUD, dan unit pelaksana teknis PP PAUD dan Dikmas serta BP PAUD dan Dikmas berada di bawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, jumlah SDM Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah sebanyak 4.905 (empat ribu sembilan ratus lima) pegawai:

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah Eselon				Jabatan Fungsional	Jumlah Staff	Total
		I	II	III	IV			
1	Ditjen Dikdasmen	1				3		4
2	Setditjen Dikdasmen		1		1	17	168	187
3	Dit. PAUD		1		1	11	79	92
4	Dit. SD		1		1	10	112	124
5	Dit. SMP		1		1	14	129	145
6	Dit. SMA		1		1	13	100	115
7	Dit. PMPK		1		1	6	153	161
8	LPMP		3	34	31	617	2144	2829
9	PP/BP PAUD		2	29	27	554	638	1248
Total		1	11	63	64	1245	3523	4905

(Sumber data fungsi HTK Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen bulan Desember 2020)

E. Isu Strategis

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2024, terdapat 4 isu strategis, yaitu:

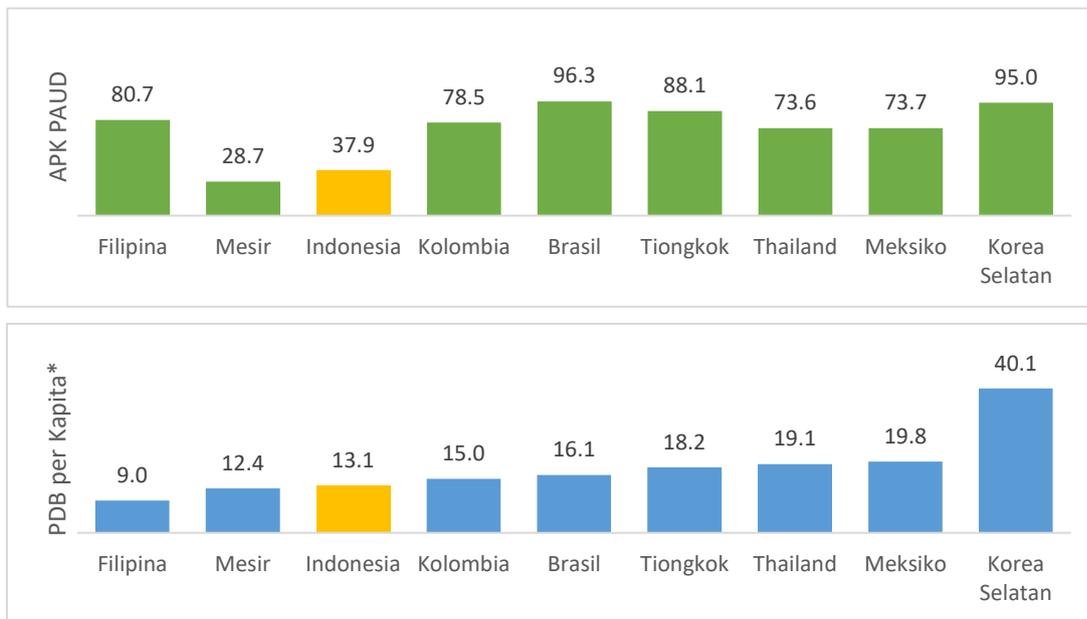
- 1) Angka partisipasi PAUD masih belum optimal;
- 2) Hasil pembelajaran siswa masih perlu ditingkatkan;
- 3) Kondisi sarana prasarana sekolah kurang memadai;
- 4) Disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar satuan pendidikan.

Secara rinci penjelasan dari keempat isu strategis di atas dapat dilihat pada uraian di bawah:

1. Angka Partisipasi PAUD masih belum optimal.

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pada periode 2015-2019. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih belum optimal jika dibandingkan dengan angka negara-negara lain.

Grafik 1. 1 Perbandingan APK PAUD dengan Negara-Negara Lain



Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti terlihat dalam Grafik 1.1, angka partisipasi PAUD Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70%. Adapun angka partisipasi PAUD berada di bawah 40%.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki GDP lebih rendah seperti Filipina dan Mesir, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi Indonesia tidak bisa berpuas diri dan telah berketetapan untuk menjadi negara maju, sehingga memerlukan SDM yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan GDP yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20%, terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (37,9%).

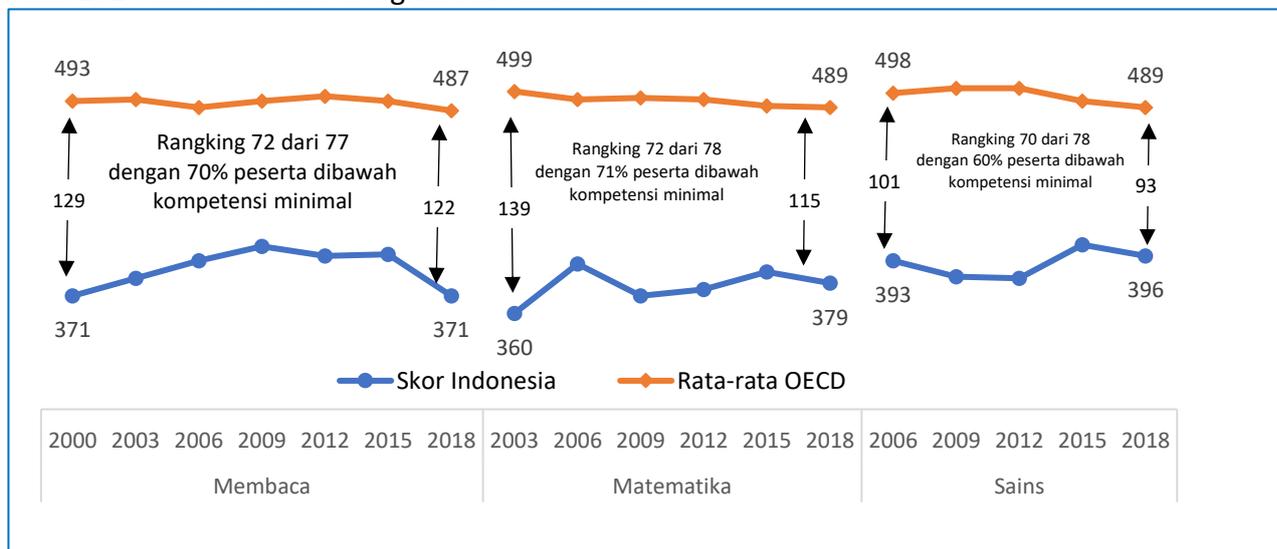
Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia, yaitu:

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden years*) masih rendah;
- Akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD.

2. Hasil Pembelajaran siswa masih perlu ditingkatkan

Hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) sudah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu ditingkatkan. Gambar 10 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018.

Grafik 1. 2 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia



Sumber: OECD 2019

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, Indonesia masih berada dibawah nilai rata-rata negara-negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Untuk bidang matematika, Indonesia berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren *stagnan*. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan.

Dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), Grafik 1.3 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD.

Grafik 1. 3 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik



Sumber: OECD, 2019

Seperti terlihat pada grafik di atas, terdapat 41% peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.



Grafik 1.3 juga menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa 'kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak', jauh di bawah nilai rata-rata negara anggota OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki

kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting.

3. Kondisi sarana prasarana sekolah kurang memadai

Data jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang akurat dan terbaru merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penguatan tata kelola pendidikan karena data tersebut digunakan dalam rangka perencanaan dan penganggaran dalam intervensi terhadap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan akses maupun mutu pendidikan. Keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilakukan terhadap satuan pendidikan sangat tergantung dari adanya data sarana dan prasarana yang akurat dan terbaru sesuai dengan kondisi terkini sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam melakukan intervensi program bantuan sarana dan prasarana. Untuk itu data sarana dan prasarana yang diinput oleh satuan pendidikan ke sistem dapodik harus selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi yang terkini.

Sampai saat ini kondisi sarana dan prasarana di sekolah masih kurang memadai. Dari dapodik menunjukkan masih banyak ruang kelas di sekolah berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Kondisi Ruang Kelas

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Sekolah dengan 100 % Ruang Kelas Baik	Sekolah dengan hanya memiliki Ruang Kelas Rusak Ringan	Sekolah memiliki Ruang Kelas Rusak Sedang & Berat				Sekolah yang tidak ada datanya
					<25%	26 – 50%	51 – 75%	>75%	
1.	SD	149.046	11.498	83.567	8.991	12.518	5.278	26.414	780
2.	SMP	40.446	4.574	21.931	3.213	2.690	1.701	5.856	481
3.	SMA	13.917	2.337	8.131	1.138	684	357	1110	160
4.	SMK	14.267	2.606	9.456	565	313	194	838	295
5.	SLB	2.241	279	1449	100	84	67	234	28
6.	TOTAL	219.917	21.294	124.534	14.007	16.289	7.597	34.452	1.744

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Dari Tabel 1.3 menunjukkan sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Di jenjang SD hanya 11.498 sekolah yang ruang kelasnya semuanya dalam keadaan baik. Secara total hanya ada 21.294 sekolah atau 9,68 % dari seluruh sekolah di semua jenjang yang ruang kelasnya dalam kondisi baik, dan 124.534 sekolah atau 56,62% ruang kelasnya dalam kondisi rusak ringan. Sisanya 33,7 % sekolah ruang kelasnya dalam kondisi rusak sedang sampai rusak total.

Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah.

Tabel 1. 4 Ketersediaan Perpustakaan di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Perpustakaan	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	105.170	13.206	69.823	13.698	9.281
2.	SMP	40.446	33.650	5.616	21.193	4.330	2.993
3.	SMA	13.917	12.721	3.272	7.962	985	632
4.	SMK	14.267	11.965	3.092	7.935	652	362
5.	SLB	2.241	1.351	240	947	123	52
6.	TOTAL	219.917	164.857	25.426	107.860	19.788	13.320

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Tabel 1. 5 Ketersediaan Laboratorium IPA di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Laboratorium IPA	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	11.291	2.788	6.876	900	787
2.	SMP	40.446	27.501	4.656	17.207	3.599	2.624
3.	SMA	13.917	3.839	974	2.406	290	218
4.	SMK	14.267	2.571	699	1.710	114	62
5.	SLB	2.241	42	10	30	1	1
6.	TOTAL	219.917	45.244	9.127	28.229	4.904	3.692

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

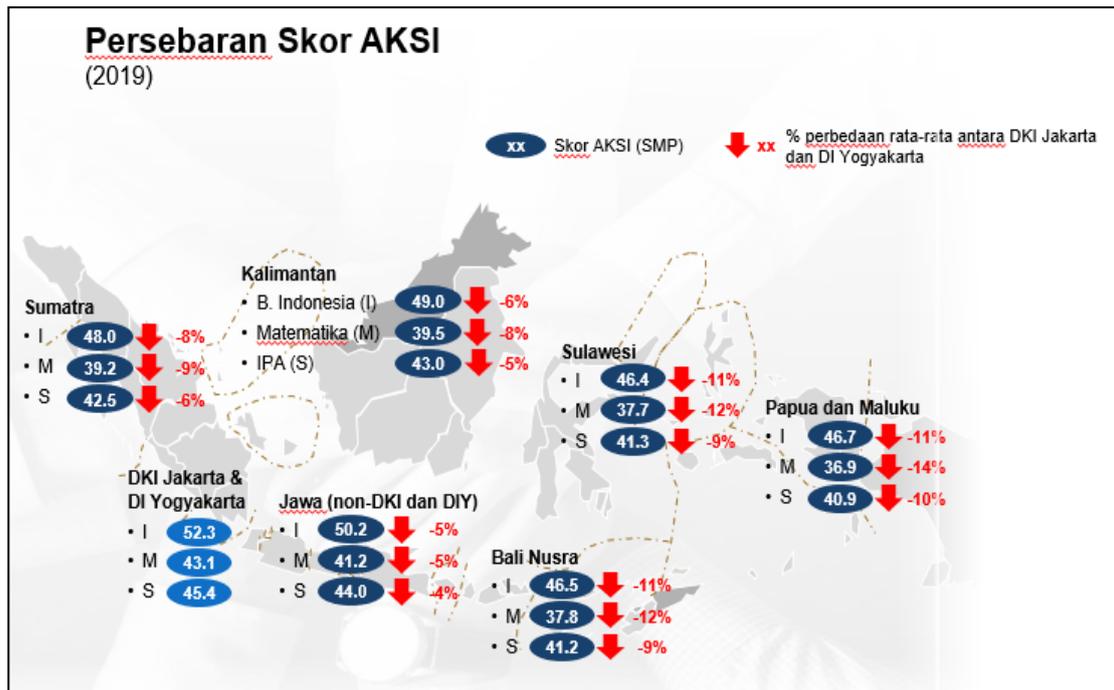
Dalam Tabel 1.4 dan 1.5 di atas terlihat hanya 25.426 sekolah atau 11,56 % mempunyai perpustakaan dalam kondisi baik. Selain itu, laboratorium IPA sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 79,43% secara nasional. Dengan demikian ke depan diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium.

Di samping itu, lebih dari 40% sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018).

4. Disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar satuan pendidikan

Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi disparitas pendidikan antar daerah maupun antar sekolah seperti Pemberian BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun demikian masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan antar satuan pendidikan. Hal ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD.

Gambar 1. 1 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019.



Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.1, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI. Jakarta dan D.I Yogyakarta dalam nilai AKSI.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

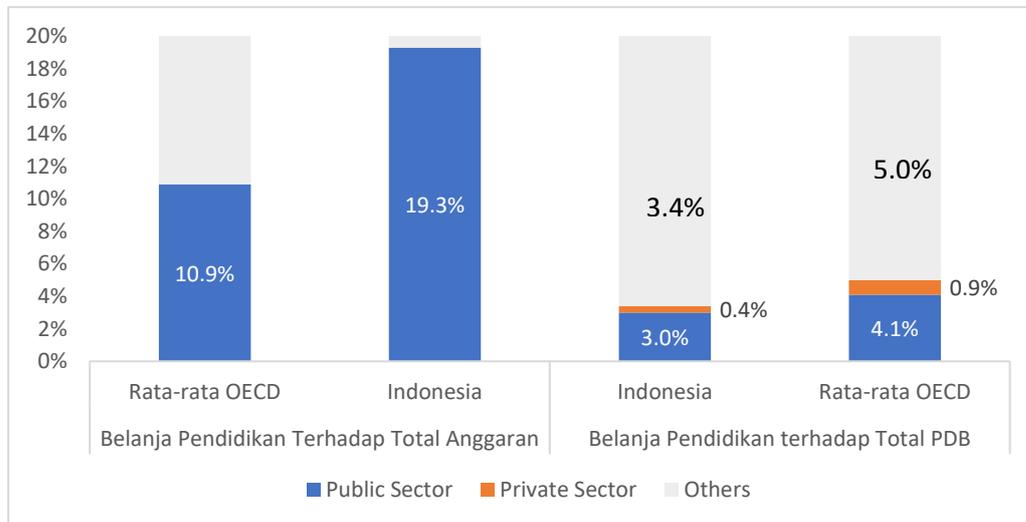
Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas.

Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah.

Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase GDP masih rendah, walaupun anggaran pemerintah

untuk pendidikan sudah besar. Grafik 1.4 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD.

Grafik 1. 4 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD



Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Pada Grafik 1.4, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen, memiliki kerangka sasaran program dan indikator kinerja program digambarkan sebagai berikut:

A. Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB yang Pernah Mengikuti TK/RA/BA (5-6 Tahun)

Indikator diatas adalah persentase jumlah siswa kelas 1 SD/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan satu tahun pra-SD (TK/RA/BA).

Target kinerja indikator ini pada tahun 2020 sebesar 66.49%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar;
- b. Memberikan bantuan sarana pembelajaran (termasuk Alat Permainan Edukatif) kepada Lembaga PAUD;
- c. Membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di Lembaga PAUD;
- d. Merevitalisasi Lembaga PAUD di daerah 3T;
- e. Merevitalisasi Lembaga PAUD percontohan;
- f. Memberikan bantuan layanan PAUD Inklusif; dan
- g. Menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Nilai Kinerja Sekolah (*Scorecard*) Minimum 75 (Kategori Tinggi)

Indikator diatas adalah pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah pada kabupaten/kota.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 kabupaten/kota.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun panduan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendidikan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Belajar Dari Rumah (BDR);
- c. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis sekolah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- d. Penyusunan Modul Bahan Ajar.

3. Jumlah Provinsi dengan Nilai Kinerja Sekolah (*Scorecard*) Minimum 75 (Kategori Tinggi)

Indikator diatas adalah pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah pada tingkat provinsi.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 provinsi.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan panduan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendidikan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Belajar Dari Rumah (BDR);
- c. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis sekolah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- d. Penyusunan Modul Bahan Ajar.

B. Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

1. Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan Nilai Scorecard Minimum 75 (Kategori Tinggi).

Indikator diatas adalah pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah. Untuk tahun 2020 belum memiliki target kinerja.

2. Jumlah Satuan Pendidikan Menjadi Sekolah Penggerak

Indikator diatas adalah sekolah yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran

Untuk tahun 2020 belum memiliki target kinerja.

Namun pencapaian untuk tahun 2021 sudah dimulai di tahun 2020 melalui kegiatan:

- a. Melakukan pemetaan sekolah;
- b. Seleksi Pemerintah Daerah yang akan menjadi lokus sekolah penggerak;
- c. Seleksi sekolah yang akan menjadi sekolah penggerak;
- d. Menyampaikan dokumen Kepmen dan nota kesepahaman sekolah penggerak kepada 34 provinsi dan 110 kab/kota;
- e. LPMP dan PP-BP PAUD melakukan konfirmasi kesediaan pemerintah daerah.

C. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pada Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

1. Persentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun Berkembang Sesuai Harapan.

Indikator diatas adalah ketika anak sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 58.70%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. PP-BP PAUD melakukan pendampingan penilaian tumbuh kembang dan lingkungan belajar;
- b. Menyalurkan bantuan implementasi program kesiapan bersekolah ke lembaga PAUD.

2. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Indikator diatas adalah jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi literasi

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 57.20%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan/bimbingan teknis penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah;
- b. Memberikan bantuan peralatan pendidikan dalam rangka pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. Memberikan bantuan operasional untuk sekolah;
- d. Menyalurkan bantuan siswa berkebutuhan khusus.

3. Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Indikator diatas adalah jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi numerasi.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 26.50%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan/bimbingan teknis penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah;
- b. Memberikan bantuan peralatan pendidikan dalam rangka pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. Memberikan bantuan operasional untuk sekolah;
- d. Menyalurkan bantuan siswa berkebutuhan khusus.

D. Meningkatnya Karakter Peserta Didik

1. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter

Indikator diatas adalah penilaian lingkungan belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 30.00%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendekatan holistik integratif pada lembaga PAUD;
- b. Menguatan kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB;
- c. Melakukan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang SD, SMP dan SMA;
- d. Memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 8 SNP pada satuan pendidikan.

2. Persentase Siswa dengan Nilai Survei Karakter Memenuhi Tingkat Minimum.

Indikator diatas adalah pengukuran karakter siswa atas keterampilan sosial emosional-etis-spiritual, kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 57.20%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendekatan holistik integratif pada lembaga PAUD;
- b. Menguatkan kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB;
- c. Melakukan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) jenjang SD, SMP dan SMA;
- d. Memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 8 SNP pada satuan pendidikan.

E. Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel Pada Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

1. Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh Bos dan Melaporkan Tepat Waktu

Indikator diatas adalah pelaksanaan penyaluran dana BOS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOS dan satuan pendidikan penerima BOS menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis yang tertuang dalam Permendikbud no. 8 tahun 2020.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 50.00%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pembuatan aplikasi pelaporan BOS;
- b. Membina sekolah penerima BOS untuk melaporkan penggunaan BOS melalui aplikasi.

2. Persentase Satuan Pendidikan yang Melakukan Penerapan BOS Non-Tunai.

Indikator diatas adalah pembelanjaan BOS menggunakan sistem pembayaran non tunai dalam sistem pembayaran perbankan, sehingga tersedia data laporan secara otomatis.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 1.80%. Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan melalui kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I melalui pembinaan secara daring kepada sekolah untuk pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah (siplah).

3. Persentase Prov/Kab/Kota yang Mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan.

Indikator diatas adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 55.00%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Memberikan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pengadaan aplikasi NPD;
- b. Membina daerah untuk menggunakan aplikasi NPD.

4. Persentase Data Pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan.

Indikator diatas adalah penilaian sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah persentase mencapai 95.00%.

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Memberikan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pengadaan aplikasi dapodik;
- b. Membina sekolah dalam pengisian aplikasi dapodik.

F. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang Berkualitas

1. Predikat SAKIP Ditjen.

Indikator diatas adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang merupakan penilaian dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Target kinerja pada tahun 2020 adalah predikat BB (skor 70-80).

Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Memberikan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pelaksanaan kegiatan kemudian melaporkan mengenai kelengkapan dokumen kegiatan tersebut pada format-format pelaporan;
- b. Membina satker pusat maupun daerah dalam memenuhi kewajiban melengkapi format-format pelaporan.

2. Jumlah Satker di Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Indikator diatas adalah penetapan Satker sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), predikat yang diberikan setelah memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas Target kinerja pada tahun 2020 adalah 11 satuan kerja. Untuk mendukung indikator ini akan dilakukan melalui kegiatan Pembinaan dan Seleksi LKE ZI-WBK/WBBM ke semua satker.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja akan menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai dan sasaran yang tidak tercapai dalam melaksanakan tugas, fungsi, kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen pada tahun 2020. Keberhasilan akan terlihat dari tercapainya target-target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal perencanaan program dan kegiatan. Gambaran keberhasilan itu setidaknya terlihat dari tidak adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Sementara ketidakberhasilan akan terlihat dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan atau terjadi kesenjangan antara target dan realisasi. Hal-hal inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam kinerja Direktorat Jenderal.

A. Capaian Kinerja

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen memiliki 6 Sasaran Program (SP) dan 16 Indikator Kinerja Program (IKP) untuk mendukung sasaran strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian IKP Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Kode	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang	Tahun 2020			
		Satuan	Target	Realisasi	% capaian
SP 3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Meningkatnya Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)*	%	66.49	67.59	101.65
IKP 3.1.2	Jumlah Kab/Kota dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)*	kab/kota	6	6	100.00
IKP 3.1.3	Jumlah Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)*	provinsi	6	9	150.00
SP 3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah				
IKP 3.2.1	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)*	%	-	-	-
IKP 3.2.2	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak*	sekolah	-	-	-
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah				
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan*	%	58.68	52.8	89.98
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum*	%	57.2	75.8	132.51

Kode	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang	Tahun 2020			
		Satuan	Target	Realisasi	% capaian
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum*	%	26.5	17.43	65.77
SP 3.4	Meningkatnya Karakter Peserta Didik				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (AKSI)*	%	30	36.73	122.43
IKP 3.4.2	Persentase siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum)*	%	57.2	61.21	107.01
SP 3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah				
IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkannya tepat waktu*	%	50	98.45	196.90
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai*	%	1.8	52.82	2934.44
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan*	%	55	56.2	102.18
IKP 3.5.4	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan	%	95	95.92	100.97
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas				
IKP 3.6.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB	predikat	BB	BB	100.00
IKP 3.6.2	Jumlah Satker yang dibina menuju Wilayah Bebas Korupsi	satker	11	13	118.18

*Indikator baru pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

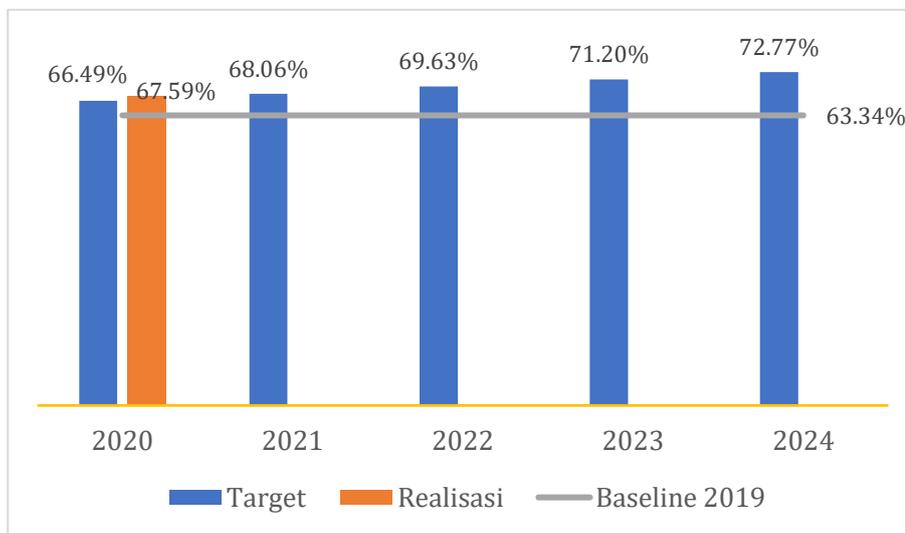
Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

1. SP 3.1 Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

- a. IKP 3.1.1 Meningkatnya Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)

Capaian Kinerja: Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 4.006.092 siswa kelas 1 SD/MI/SDLB di Indonesia, dari jumlah tersebut 2.707.718 siswa pernah mengikuti jenjang TK/RA/BA. Dari data tersebut dengan demikian capaian siswa kelas I yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah adalah 67,59%. Dengan target sebesar 66,49% maka realisasi capaian terhadap target adalah 101,65% dan jika capaian dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2024 (72,77%), maka capaian tahun 2020 telah mencapai 92,88%.

Grafik 3. 1 Capaian Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB yang Pernah Mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 Tahun)



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Tingkat pemahaman orangtua/wali terhadap pentingnya PAUD masih rendah karena masih adanya anggapan di kalangan masyarakat tidak perlu mengikuti pendidikan jenjang prasekolah (TK/RA/BA) sebelum masuk ke jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 2) Sosialisasi pentingnya pendidikan jenjang pra sekolah yang masih belum maksimal;
- 3) Tingkat kesejahteraan sosial peserta didik dimana biaya pendidikan jenjang TK/RA/BA cukup besar bagi orangtua/wali, penyebabnya karena jumlah satuan pendidikan TK/RA/BA swasta lebih banyak dari negeri;
- 4) Akses ketersediaan sarana bersekolah jenjang prasekolah di daerah-daerah tertentu terutama daerah 3T yang belum mencukupi atau bila ada memiliki jarak yang cukup jauh.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti pendidikan di jenjang TK/RA/BA sebelum memasuki jenjang SD;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD;
- 3) Melaksanakan kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD seperti USB, RKB, Rehabilitasi, Renovasi dan kegiatan pembangunan pendidikan lainnya.

Strategi dan Inovasi

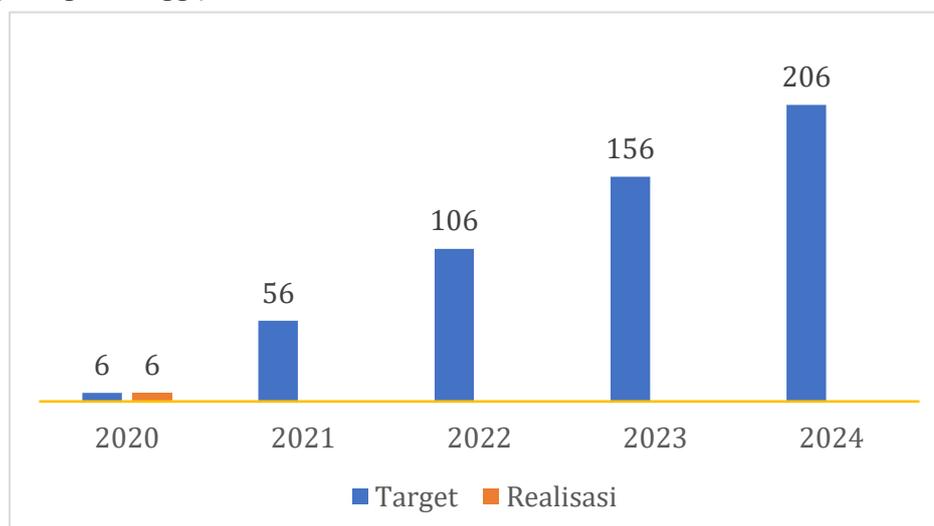
- 1) Menyalurkan BOP ke lembaga PAUD berdasarkan data dapod PAUD;
- 2) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara daring kepada seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD;

3) Memberikan bantuan sarana pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) ke lembaga PAUD.

b. IKP 3.1.2 Jumlah Kab/Kota dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah program scorecard. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan data rapor mutu penjaminan mutu pendidikan daerah. Dari skala rapor mutu 1-7 diambil nilai rata-rata nasional 6.59 yang menghasilkan 6 kab/kota berada diatas rata-rata tersebut. Dengan target 6 kab/kota maka ketercapaian target mencapai 100%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (206 kab/kota) capaian tahun 2020 hanya mencapai 2,91%.

Grafik 3. 2 Capaian Jumlah Kab/Kota Dengan Nilai Score Card Minimum 75 (Kategori Tinggi)



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Adanya perubahan dalam proses pengukuran scorecard sehingga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2020;
- 2) Koordinasi antar unit pelaksana terkait program tersebut masih perlu ditingkatkan;
- 3) Sampai dengan Desember 2020 masih dalam tahap finalisasi penentuan pengukuran indikator.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Memfinalisasi program scorecard baik definisi maupun indikator-indikator serta sistem penilaian;
- 2) Meningkatkan koordinasi antar unit pelaksana program scorecard terutama ke daerah;

- 3) Mengoptimalkan persiapan demi percepatan pelaksanaan program scorecard.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan pembinaan kepada sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 2) Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Sekolah yang mendapatkan pembinaan;
- 3) Melakukan pendampingan/bimbingan teknis penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah.

c. IKP 3.1.3 Jumlah Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah program scorecard. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan data rapor mutu penjaminan mutu pendidikan daerah. Dari skala rapor mutu 1-7 diambil nilai rata-rata nasional 6.59 yang menghasilkan 9 provinsi berada diatas rata-rata tersebut. Dengan target 6 provinsi maka ketercapaian target mencapai 150%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (20 provinsi) capaian tahun 2020 hanya mencapai 45,00%.

Grafik 3. 3 Capaian Jumlah Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Adanya perubahan dalam proses pengukuran scorecard sehingga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2020;
- 2) Koordinasi antar unit pelaksana terkait program tersebut masih perlu ditingkatkan;

- 3) Sampai dengan Desember 2020 masih dalam tahap finalisasi penentuan pengukuran indikator.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Memfinalisasi program scorecard baik definisi maupun indikator-indikator serta sistem penilaian;
- 2) Meningkatkan koordinasi antar unit pelaksana program scorecard terutama ke daerah;
- 3) Mengoptimalkan persiapan demi percepatan pelaksanaan program scorecard.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan pembinaan kepada sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 2) Menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Sekolah yang mendapatkan pembinaan;
- 3) Melakukan pendampingan/bimbingan teknis penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah.

2. SP 3.2 Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. IKP 3.2.1 Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)

Pada tahun 2020 untuk indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 belum menetapkan target. Walaupun demikian kegiatan-kegiatan awal telah dilakukan, antara lain:

- 1) Penyusunan panduan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pendidikan;
- 2) Monitoring dan Evaluasi Belajar Dari Rumah (BDR);
- 3) Fasilitasi dan Bimbingan Teknis sekolah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 4) Penyusunan Modul Bahan Ajar.

- b. IKP 3.2.2 Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak

Pada tahun 2020 pada indikator kinerja Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak belum menetapkan target. Walaupun demikian kegiatan-kegiatan awal telah dilakukan antara lain:

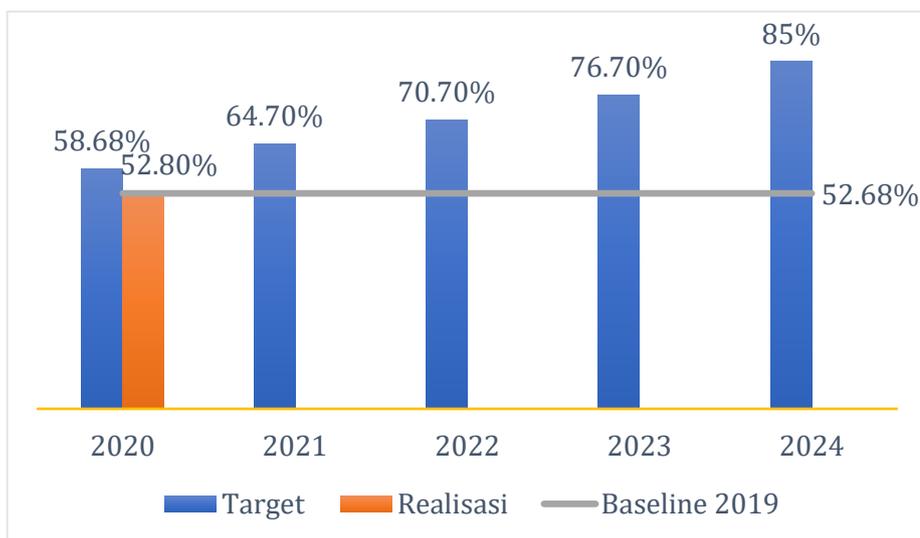
- 1) Melakukan pemetaan sekolah;
- 2) Seleksi Pemerintah Daerah yang akan menjadi lokus sekolah penggerak;
- 3) Seleksi sekolah yang akan menjadi sekolah penggerak;
- 4) Menyampaikan dokumen Kepmen dan nota kesepahaman sekolah penggerak kepada 34 provinsi dan 110 kab/kota;
- 5) LPMP dan PP-BP PAUD melakukan konfirmasi kesediaan pemerintah daerah.

3. SP 3.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. IKP 3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan

Capaian Kinerja: Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 43,30% anak usia dini yang telah mencapai standar Berkembang Sesuai Harapan (BSH) serta 9,50% anak Berkembang Sangat Baik (BSB), dari capaian tersebut terakumulasi 52,80% anak usia dini telah mencapai standar. Dengan target indikator sebesar 58,68% maka realisasi capaian terhadap target adalah 89,98%, dan jika capaian dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2024 (85,00%), maka capaian tahun 2020 telah mencapai 62,12%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

Grafik 3. 4 Capaian Persentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun Berkembang Sesuai Harapan



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Kondisi pandemi menyebabkan nilai perkembangan anak menurun dikarenakan aktifitas yang dapat dilakukan terbatas, serta kurangnya kesempatan bersosialisasi anak disebabkan tidak berlangsungnya pembelajaran tatap muka;
- 2) Proses penilaian perkembangan anak sulit dilakukan bila pembelajaran tatap muka tidak berlangsung karena memerlukan pengamatan langsung oleh guru;
- 3) Pengetahuan baik dari guru, orangtua maupun masyarakat dalam melakukan pendidikan kepada anak usia dini dalam kondisi luar biasa seperti pandemi masih rendah.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Memaksimalkan kegiatan belajar dari rumah secara daring;

- 2) Memberikan pedoman kepada guru untuk bisa melakukan penilaian perkembangan anak secara daring;
- 3) Meningkatkan pengetahuan kepada orangtua dan masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembelajaran secara mandiri di rumah.

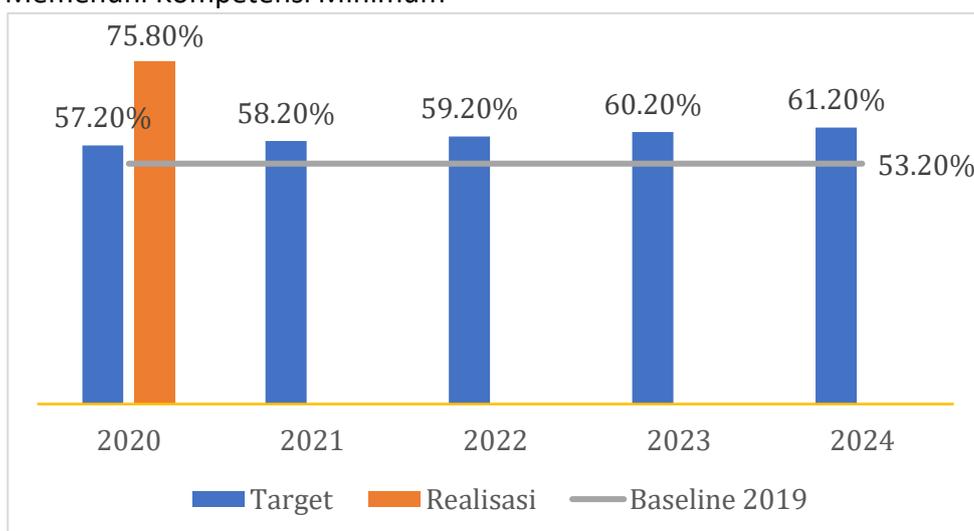
Strategi dan Inovasi

- 1) Menggunakan layanan dalam jaringan (daring) sebagai sarana pembelajaran;
- 2) Melakukan peningkatan pengetahuan tenaga pendidik dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah (BDR), maupun pemantauan perkembangan anak didik melalui sarana daring.

b. IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah asesmen kompetensi. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan persentase rata-rata dari hasil capaian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jenjang SD menggunakan persentase pada AKSI, sementara untuk jenjang SMP dan SMA menggunakan nilai UN dengan mengambil persentase siswa yang memiliki nilai 55 atau lebih sesuai Kompetensi Kelulusan Minimal (KKM). Dari data didapat nilai persentase AKSI SD adalah 53,17%, nilai persentase UN SMP adalah 85,80%, dan nilai persentase UN SMA adalah 88,43% sehingga didapatkan persentase rata-rata literasi sebesar 75,80. Dengan target 57,20% maka ketercapaian target mencapai 150%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (61,20%) capaian tahun 2020 telah melampaui yaitu sebesar 123,85%.

Grafik 3. 5 Capaian Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Adanya perbedaan persepsi mengenai asesmen baik di tingkat pemangku kepentingan hingga guru, siswa, dan masyarakat;
- 2) Kegiatan penilaian AKM di tahun 2020 oleh unit yang berwenang masih merupakan tahun inisiasi, dan baru mulai dilaksanakan 2021, yang menyebabkan hasil penilaian resmi belum memungkinkan.

Rekomendasi tindak lanjut

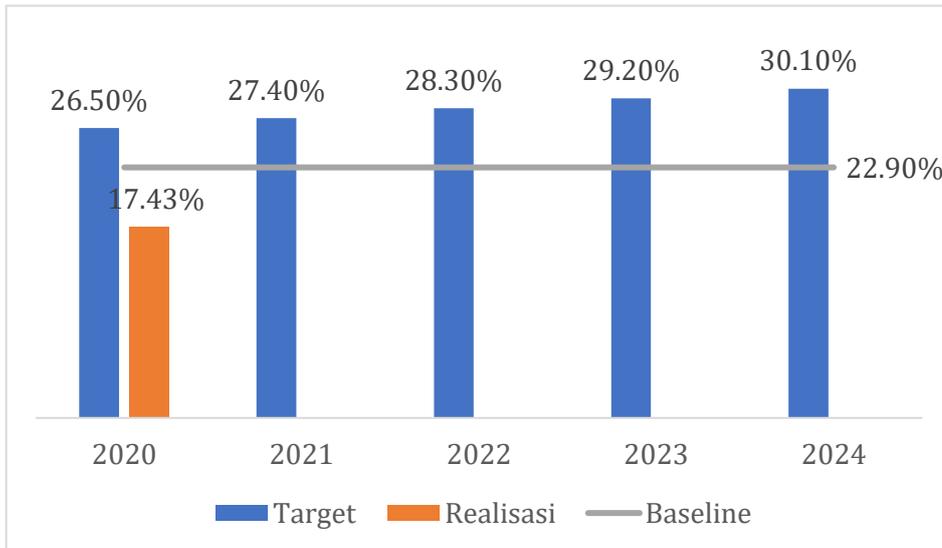
- 1) Menyamakan pemahaman dan persepsi pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan AKM, definisi maupun pengukuran, termasuk sosialisasi;
- 2) Mengoptimalkan persiapan demi percepatan pelaksanaan program asesmen.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan pendampingan/bimbingan teknis penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah;
 - 2) Mendorong penggunaan bantuan operasional sekolah untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - 3) Mendorong gerakan gemar membaca melalui surat edaran Mendikbud kepada satuan pendidikan;
 - 4) Memperkuat praktik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan strategi inovatif;
 - 5) Mendorong budaya membaca di masa pandemi.
- c. IKP 3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah program asesmen kompetensi. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan persentase rata-rata dari hasil capaian mata pelajaran Matematika. Jenjang SD menggunakan persentase pada AKSI, sementara untuk jenjang SMP dan SMA menggunakan nilai UN dengan mengambil persentase siswa yang memiliki nilai 55 atau lebih sesuai Kompetensi Kelulusan Minimal (KKM). Dari data tersebut didapat nilai persentase AKSI SD adalah 22,87%, nilai persentase UN SMP adalah 20,69%, dan nilai persentase UN SMA adalah 8,74% sehingga didapatkan persentase rata-rata numerasi sebesar 17,43%. Dengan target 26,50% maka ketercapaian target mencapai 65,77%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (30,10%) capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 57,91%.

Grafik 3. 6 Capaian Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Asesmen Kompetensi belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan dan satuan pendidikan;
- 2) Tahun 2020 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan program AKM;
- 3) Kurangnya minat siswa pada bidang numerasi;
- 4) Belum maksimalnya metode pembelajaran maupun kompetensi tenaga pendidik pada bidang numerasi.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Menyamakan pemahaman dan persepsi pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan AKM, definisi maupun pengukuran, termasuk sosialisasi;
- 2) Mengoptimalkan persiapan demi percepatan pelaksanaan program asesmen;
- 3) Mendorong gerakan mengenal angka dan gemar berhitung pada anak usia dini;
- 4) Membiasakan penggunaan angka, analisa, dan logika pada siswa pendidikan dasar dan menengah.

Strategi dan Inovasi

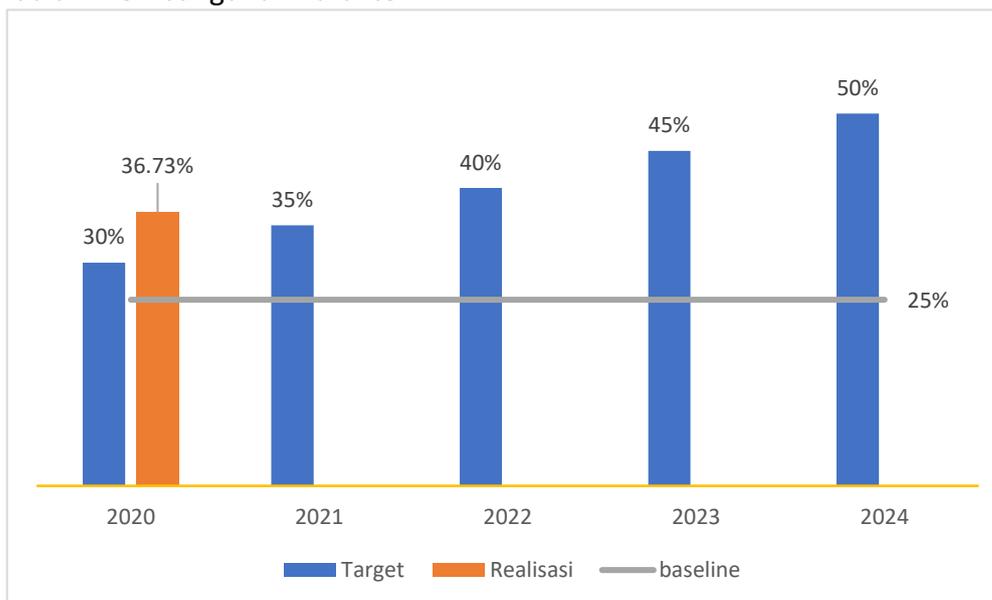
- 1) Melakukan pendampingan/bimbingan teknis Penilaian kepada dinas pendidikan kab/kota melalui pengawas sekolah;
- 2) Mendorong penggunaan bantuan operasional sekolah untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penyediaan alat multi media pembelajaran;
- 3) Memperkuat praktik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan strategi inovatif.

4. SP 3.4 Meningkatnya Karakter Peserta Didik

- a. IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (AKSI)

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah program lingkungan kondusif. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan data rapor mutu penjaminan mutu pendidikan daerah dengan mengambil indikator yang terkait lingkungan kondusif. Dari skala rapor mutu 1-7 diambil batas minimal nasional 6.9. Dari data tersebut didapat nilai persentase SD adalah 35,43%, nilai persentase SMP adalah 42,49%, dan nilai persentase SMA adalah 34,28% sehingga didapatkan persentase rata-rata lingkungan kondusif sebesar 36,73%. Dengan target sebesar 30% maka ketercapaian target mencapai 122,43%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (50%) capaian tahun 2020 telah mencapai 73,46%.

Grafik 3. 7 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Pengukuran Indikator baru memerlukan waktu dalam penerapan maupun penilaiannya;
- 2) Lingkungan kondusif belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan seperti dinas Pendidikan dan satuan pendidikan;
- 3) Tahun 2020 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan program lingkungan kondusif, sehingga penilaian tentang lingkungan kondusif baru dapat diperoleh mulai tahun 2021.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meningkatkan kinerja dan koordinasi unit-unit yang terkait dengan Lingkungan Kondusif;
- 2) Menyamakan pemahaman dan persepsi pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Lingkungan Kondusif, definisi maupun pengukuran, termasuk sosialisasi;
- 3) Meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai Lingkungan Kondusif ke daerah dengan target sekolah-sekolah.

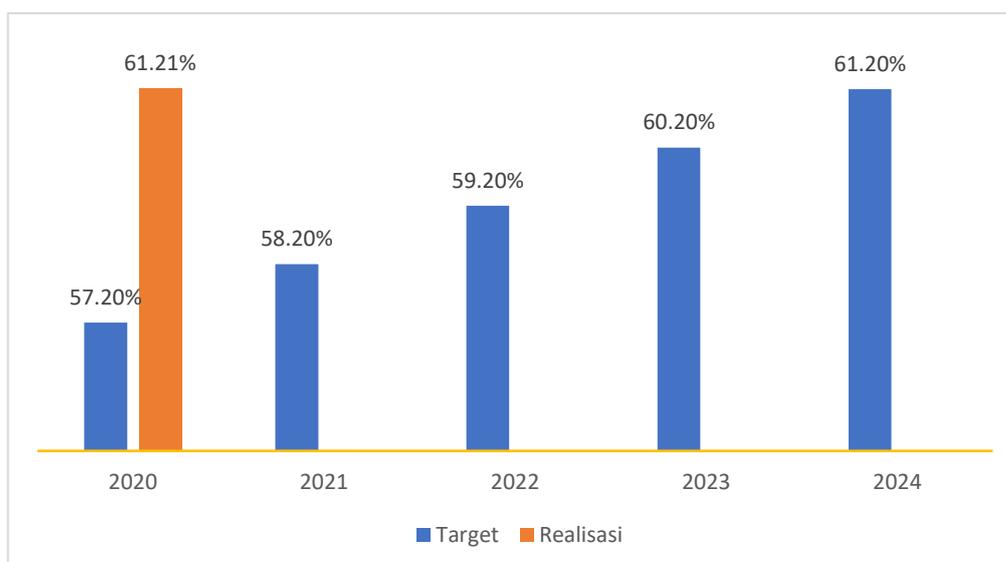
Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini (pendekatan holistik integratif);
- 2) Melakukan penguatan ekstrakurikuler;
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 4) Memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam penggunaan dana BOS selama masa pandemi terutama untuk penyediaan sarana protokol kesehatan seperti seperti pengadaan tempat cuci tangan di sekolah.

b. IKP 3.4.2 Persentase siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum)

Capaian Kinerja: Kondisi luar biasa pandemi dan dinamika yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan beberapa program pada tahun 2020 tertunda pelaksanaannya termasuk didalamnya adalah survey karakter. Maka penilaian tahun 2020 untuk indikator ini menggunakan data rapor mutu penjaminan mutu pendidikan daerah dengan mengambil indikator yang terkait karakter. Dari skala rapor mutu 1-7 diambil batas minimal nasional 6.79. Berdasarkan data survey didapat dari populasi 2.904.018 siswa sebanyak 1.777.480 siswa telah memenuhi atau 61,21%. Dengan target sebesar 57,20% maka ketercapaian target mencapai 107,01%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir 5 tahun renstra 20-24 (61,20%) capaian tahun 2020 telah melampaui yaitu 100,02%.

Grafik 3. 8 Persentase siswa dengan nilai Survey Karakter memenuhi (tingkat minimum)



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Pengukuran Indikator baru memerlukan waktu dalam penerapan maupun penilaiannya;
- 2) Survey karakter belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan seperti dinas Pendidikan dan satuan pendidikan;
- 3) Tahun 2020 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan program survey karakter, sehingga penilaian tentang survey karakter baru dapat diperoleh mulai tahun 2021.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meningkatkan kinerja dan koordinasi unit-unit yang terkait dengan Survey Karakter;
- 2) Menyamakan pemahaman dan persepsi pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Survey Karakter, indikator maupun pengukuran, termasuk sosialisasi;
- 3) Meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai pelaksanaan survey karakter ke daerah dengan target sekolah-sekolah.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini (pendekatan holistik integratif);
- 2) Melakukan penguatan ekstra kurikuler seperti pramuka, Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), dan lain lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);

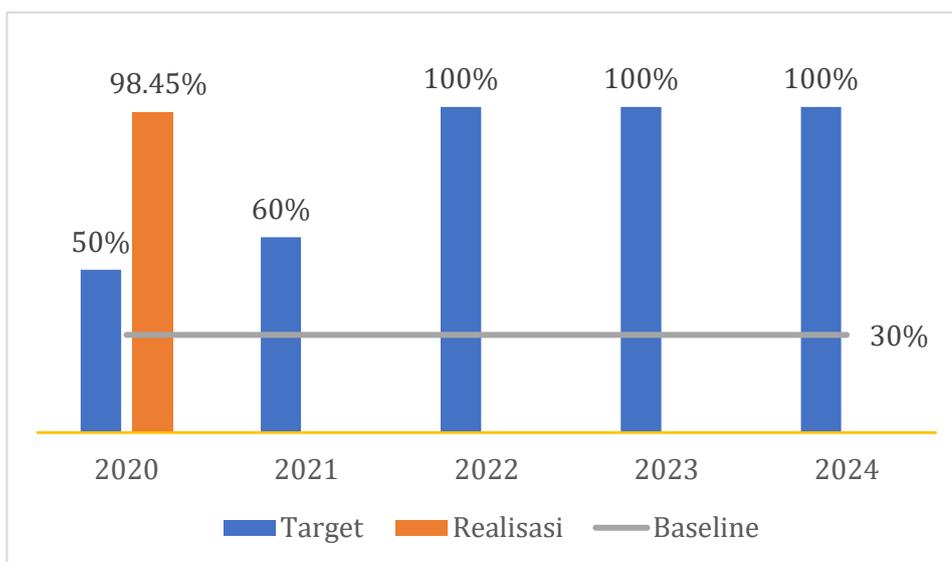
- 4) Memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam penggunaan dana BOS selama masa pandemi terutama untuk penyediaan sarana protokol kesehatan seperti seperti pengadaan tempat cuci tangan di sekolah.

5. SP 3.5 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. IKP 3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkannya tepat waktu

Capaian Kinerja: Pada penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 di tahap 2, nilai satuan pendidikan yang memperoleh BOS sebanyak 216.382 sekolah, yang melaporkan melalui BOS online sebanyak 213.047 sekolah, tidak melaporkan 3.335 sekolah sehingga mendapatkan angka capaian 98,45%. Dengan target sebesar 50,00% maka ketercapaian target mencapai 196,90%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada 2024 yaitu 100,00%, maka capaian tahun 2020 telah mencapai 98,45%.

Grafik 3. 9 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Terdapat daerah-daerah tertentu terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), dimana akses dalam jaringan (daring) masih sulit;
- 2) Terdapat Satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik sesuai batas waktu cut off, belum memiliki izin operasional aktif, serta keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan dana BOS;
- 3) Data rekening sekolah salah yang diakibatkan perubahan dan kesalahan input;
- 4) Masih kurangnya koordinasi antar unit pelaksana penyaluran dana BOS.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) meningkatkan fungsi dinas pendidikan terkait data satuan pendidikan dalam pemenuhan syarat penerima dana BOS serta proses penyaluran dana BOS;
- 2) Pelatihan ke daerah terhadap lembaga yang terkendala dalam pengisian dapodik;
- 3) Meningkatkan koordinasi antar unit pelaksana penyaluran dana BOS;
- 4) Meningkatkan sosialisasi ke sekolah mengenai pengisian data terkait BOS yang baik dan sesuai petunjuk teknis;
- 5) Peningkatan verifikasi dan validasi syarat penyaluran dan pelaporan BOS melalui integrasi system Dapodik, BOS Salur, dan RKAS.

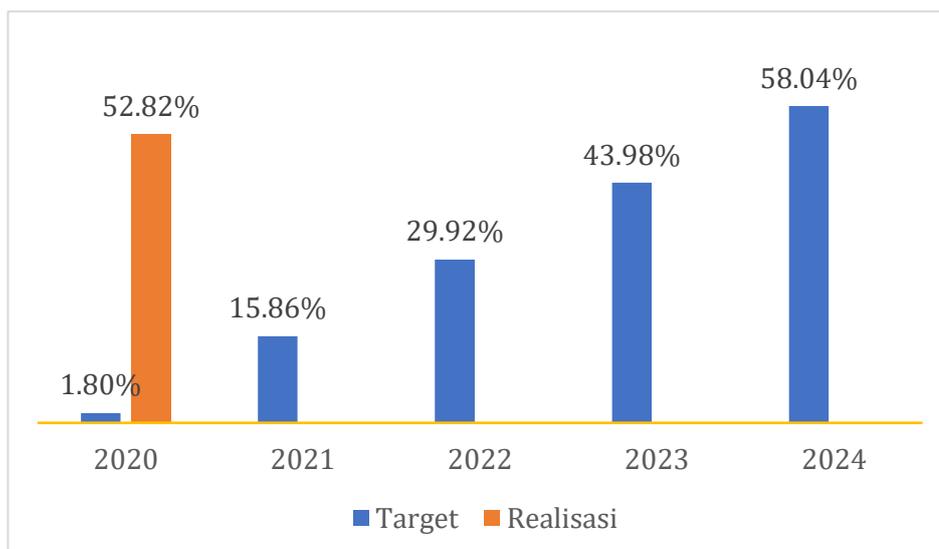
Strategi dan Inovasi

- 1) Melaksanakan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pengelolaan aplikasi pelaporan BOS;
- 2) Melakukan percepatan pengisian dapodik sebelum cut off BOS dengan uji petik ke daerah
- 3) Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah memangkas jalur birokrasi;
- 4) Membuat aplikasi khusus untuk penanganan sistem informasi rekening sekolah, penyaluran dan pelaporan BOS pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id/> (BOS Salur);
- 5) Berkoordinasi dengan bank penyalur dan dinas pendidikan terkait rekening sekolah yang tidak aktif.

b. IKP 3.5.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai

Capaian Kinerja: Pada penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, penggunaan anggaran BOS non tunai dilakukan melalui aplikasi siplah.kemdikbud.go.id. Dari jumlah total sekolah penerima BOS secara keseluruhan yaitu 217.821 sekolah, tercatat yang menggunakan aplikasi siplah sebanyak 115.068 sekolah atau sebesar 52,82%. Dengan target sebesar 1,80% maka ketercapaian target mencapai 2.934,44%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada 2024 yaitu 58,04%, maka capaian tahun 2020 telah mencapai 91,01%.

Grafik 3. 10 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Melakukan Penerapan BOS-Non-Tunai



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Terdapat daerah-daerah tertentu terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), dimana akses dalam jaringan (daring) masih sulit;
- 2) Masih kurangnya pengetahuan sekolah dalam melakukan belanja non tunai;
- 3) Terbatasnya jenis barang yang disediakan di siplah;
- 4) Masih adanya toko penyedia yang kurang berminat berpartisipasi karena kurangnya pengetahuan mengenai sistem penjualan non tunai.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meningkatkan sosialisasi penggunaan format belanja non tunai;
- 2) Memperbanyak jumlah penyedia dan jenis barang yang tersedia pada aplikasi siplah;
- 3) Meningkatkan kualitas sistem pembelanjaan non tunai.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan layanan dukungan manajemen eselon I melalui pembinaan secara daring kepada sekolah untuk pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah (siplah);
- 2) Melakukan pembinaan aktif kepada sekolah penerima BOS untuk penggunaan dana BOS melalui format non tunai.

- c. IKP 3.5.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan

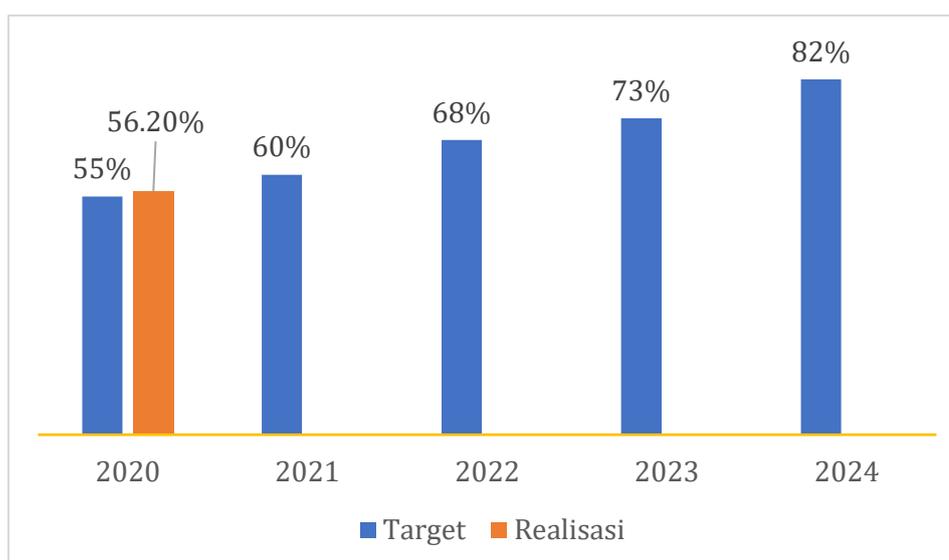
Capaian Kinerja: Pada indikator penggunaan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambil keputusan di daerah, penilaian capaian indikator dilakukan melalui survey daring ke provinsi/kab/kota, dari indikator-indikator yang ditanyakan, didapat hasil data penggunaan NPD oleh daerah. Dari 548 responden, kategori yang memanfaatkan

NPD sebanyak 308 prov/kab/kota atau mencapai 56,20%. Dengan target sebesar 55,00% maka ketercapaian target mencapai 102,18%. Persentase ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada 2024 yaitu 82,00%, maka capaian tahun 2020 telah mencapai 68,54%.

Tabel 3. 2. Instrumen survey pemanfaatan neraca pendidikan daerah

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Tahu
1	Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah					
2	Saya baru mengetahui NPD pada tahun ini					
3	Saya selalu menggunakan informasi dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) untuk analisis perencanaan pendidikan					
4	Saya telah mengenalkan NPD kepada satuan kerja lain seperti Bappeda di wilayah saya bekerja					
5	NPD sangat membantu saya dalam menyusun perencanaan program dan anggaran					

Grafik 3. 11 Capaian Persentase Prov/Kab/Kota yang Mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai Dasar Pengambilan Keputusan



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Peralihan unit pelaksana pengukuran dari Sekretariat Jenderal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2) Lingkup NPD yang meliputi seluruh Kemdikbud, tidak hanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3) Pemindahan pengelola aplikasi maupun data NPD memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meninjau ulang unit pelaksana NPD sesuai lingkup pengguna;
- 2) Memindahkan Unit Pelaksana pengukuran NPD ke unit kerja yang menaungi keseluruhan pengukuran NPD;
- 3) Menyiapkan sumber daya yang memadai dalam pemindahan aplikasi NPD.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan layanan dukungan manajemen eselon I dengan mengelola aplikasi NPD;
- 2) Melakukan pembinaan kepada daerah dalam penggunaan aplikasi NPD.

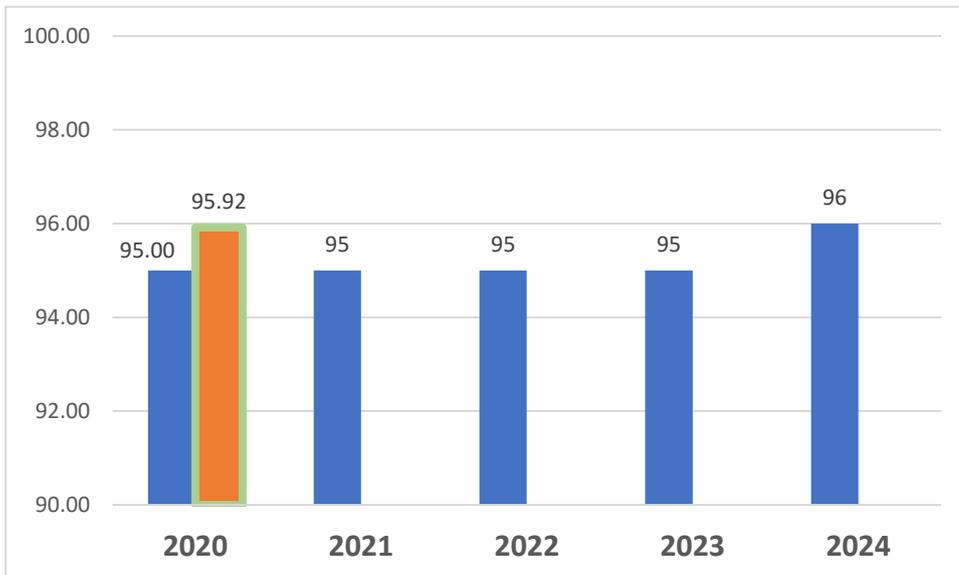
d. IKP 3.5.4 Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan

Capaian Kinerja: Pada indikator persentase data pokok pendidikan (dapodik) yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan. Capaian kinerja diambil dari aplikasi validasi dikdasmen online. Dari data per akhir Desember didapat nilai akurat 92,03%, terbaru 98,16%, dan berkelanjutan 97,58. Sehingga mendapatkan angka rata-rata 95,92%. Dengan target sebesar 95,00% maka ketercapaian target mencapai 100,97%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 89,00% maka terdapat kenaikan sebesar 6,92% sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2024 (96,00%), maka capaian tahun 2020 telah mencapai 99,91%.

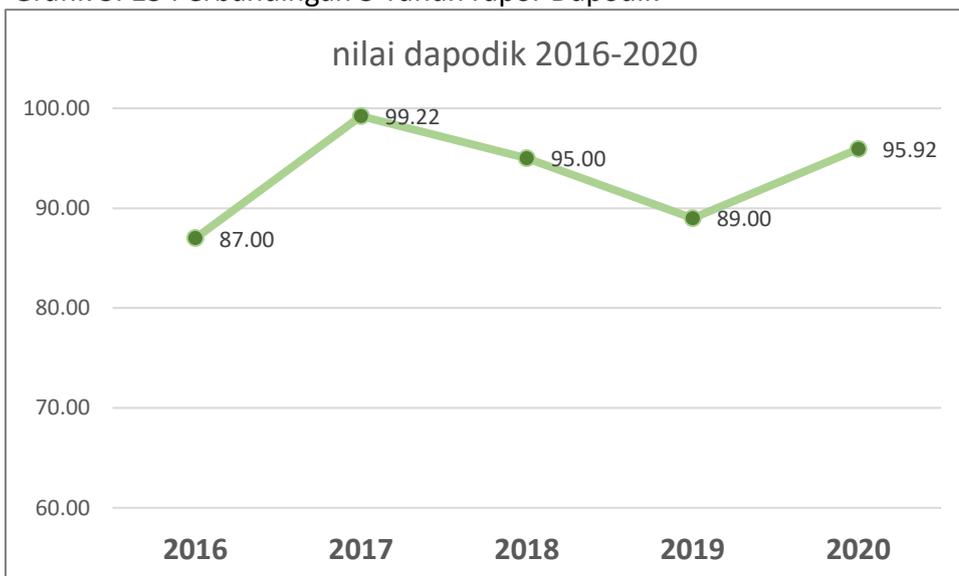
Yang dimaksud Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan dalam metode perhitungan adalah sebagai berikut:

- Akurat adalah data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dan sebagainya), persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah data akurat}/\text{jumlah data}) \times 100\%$
- Berkelanjutan adalah pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan}/\text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
- Terbaru adalah pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data}/\text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
- $\Sigma (1+2+3)/3$ Satuan: Persentase (%). Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Grafik 3. 12 Capaian Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan



Grafik 3. 13 Perbandingan 5 Tahun rapor Dapodik



Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 dan Capaian Kinerja Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Aplikasi versi baru untuk jenjang PAUD, PKBM serta SKB membutuhkan adaptasi penggunaan;
- 2) Proses mutasi siswa dari sekolah lama belum dilakukan;
- 3) Koordinasi dinas pendidikan dengan sekolah mengalami kendala jarak.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk lembaga yang belum sinkronisasi sebelum batas waktu pengisian dapodik selesai (pergantian semester);

- 2) Membuat surat edaran pada daerah untuk memerintahkan sekolah yang mengalami mutasi siswa, agar segera melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik;
- 3) Pelatihan ke daerah terhadap lembaga yang terkendala dalam pengisian dapodik (progres sinkronisasi nya minim);

Strategi dan Inovasi

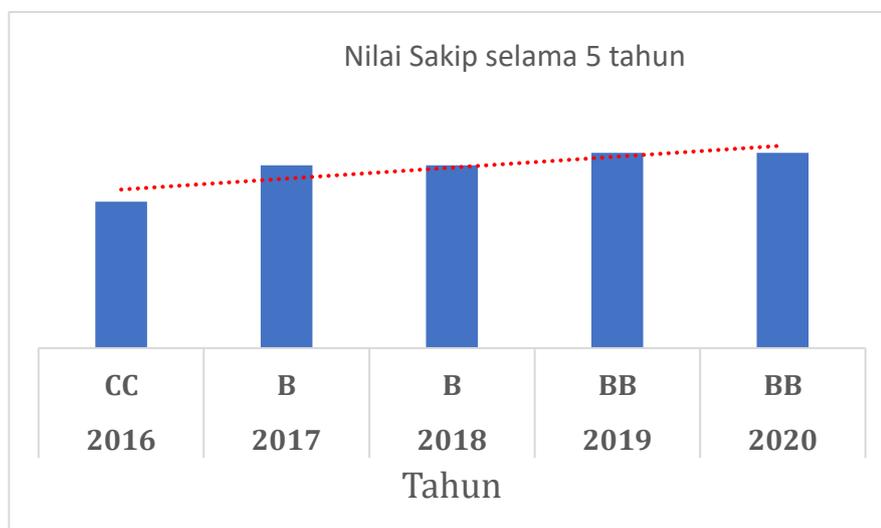
- 1) Bimbingan teknis untuk dapodik mengenai tata cara pengisian dapodik versi terbaru;
- 2) Koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota setempat untuk memverifikasi keberadaan lembaga yang aktif/tidak;
- 3) Melakukan uji petik dapodik ke daerah;
- 4) Melakukan validasi dapodik secara rutin;
- 5) Penambahan fitur rapor dapodik pada laman
<http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.

6. SP 3.6 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

- a. IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB

Capaian Kinerja: Indikator predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2020 merupakan hasil penilaian penerapan akuntabilitas mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pada 2020 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan nilai 75,13 masuk dalam kategori BB. Dengan target BB maka perbandingan capaian dengan target mencapai 100,00%. Hal ini mempertahankan capaian tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada 2024 yaitu A, maka capaian tahun 2020 masih perlu ditingkatkan.

Grafik 3. 14 Capaian Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas



Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Kekurangpahaman unit/satker/UPT dalam mengimplementasikan penilaian kinerja ke dalam aplikasi;
- 2) Kurang selarasnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
- 3) Pemanfaatan sistem pengukuran kinerja belum maksimal;

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Pembinaan SDM pengelola akuntabilitas;
- 2) Perlu adanya pemetaan/*cascading* terkait dengan indikator, output, suboutput sampai kepada level komponen pada dokumen penganggaran;
- 3) Peningkatan asistensi penyusunan dokumen SAKIP.

Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan layanan dukungan manajemen eselon I meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen akuntabilitas, dokumen perencanaan kinerja, serta dokumen keuangan;
- 2) Koordinasi yang baik antar unit/satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pembinaan, peningkatan pengawasan, evaluasi serta pelaporan.

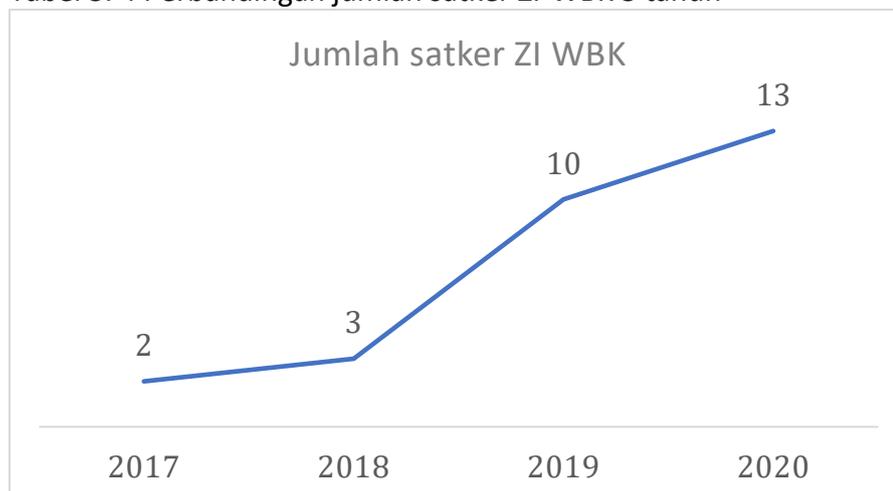
b. IKP 3.6.2 Jumlah Satker yang dibina menuju Wilayah Bebas Korupsi

Capaian Kinerja: Indikator Jumlah Satker yang dibina menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah penilaian terhadap satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat diberikan kepada satker yang memenuhi indikator besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas. Indikator keberhasilannya yaitu meningkatnya jumlah satker yang memenuhi indikator WBK di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan dikoordinir di lingkungan Kemendikbud oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Pada 2020 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen telah mendapatkan 10 satuan kerja mendapatkan predikat WBK, dan 3 satker berpredikat ZI-WBK sehingga total terdapat 13 satker dari target sebanyak 11 satker. Dengan demikian capaian keberhasilan mencapai 118,18%. Bila dibandingkan capaian tahun 2019 sebanyak 10 satker berpredikat WBK maka terdapat peningkatan sebanyak 3 satker atau sebesar 3,33% .

Tabel 3. 3 Capaian Satker ZI-WBK



Tabel 3. 4 Perbandingan jumlah satker ZI-WBK 5 tahun



Analisis dan Evaluasi Kinerja

Permasalahan

- 1) Kekurangpahaman penerapan zona integritas;
- 2) Kurangnya aktifnya peran agen perubahan sebagai katalisator, maupun penggerak;
- 3) Merubah mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Melakukan sosialisasi pemahaman tentang Zona Integritas;
- 2) Membentuk tunas integritas untuk melaksanakan perubahan budaya kerja;
- 3) Menyempurnakan SOP terkait dengan mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja pada unit kerja.

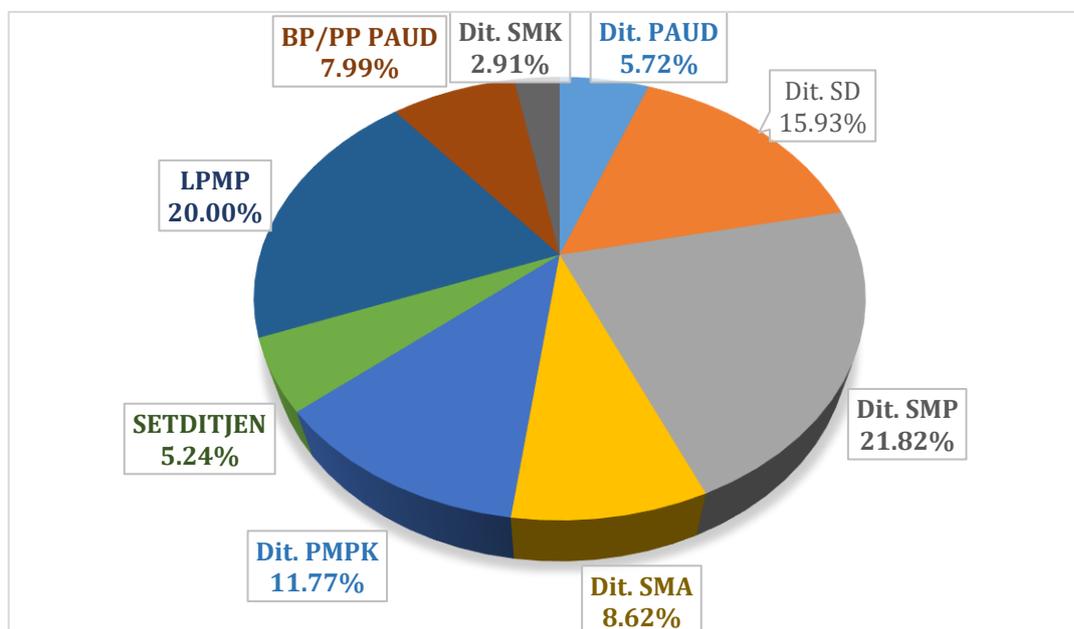
Strategi dan Inovasi

- 1) Melakukan pembinaan dan seleksi LKE ZI-WBK/WBBM ke semua satker;
- 2) Memaksimalkan peran agen perubahan;
- 3) Melakukan sosialisasi dan bimtek strategi terhadap satker menuju ZI-WBK/WBBM.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Berdasarkan DIPA Tahun 2020 sebesar Rp4.812.589.293.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai pembinaan sekolah menengah pertama sebesar 21,82%; peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 20,00%; pembinaan sekolah dasar sebesar 15,93%; pembinaan Pendidikan khusus dan layanan khusus sebesar 11,77%; pembinaan sekolah menengah atas sebesar 8,62%; layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan dikmas sebesar 7,99%; penyediaan layanan PAUD sebesar 5,72%; dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan dasar dan menengah sebesar 5,24%; dan pembinaan sekolah menengah kejuruan sebesar 2,91%. Persentase alokasi anggaran persatker dapat terlihat dalam grafik berikut:

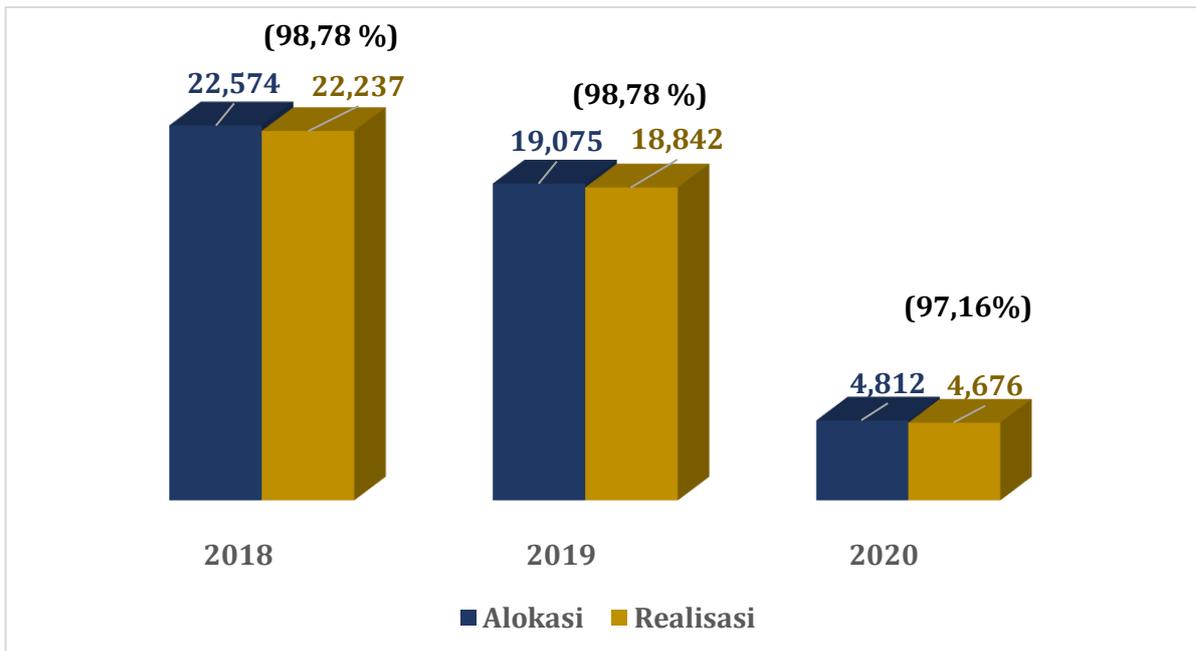
Grafik 3. 15 Persentase Alokasi Anggaran Per Satker Tahun 2020



Sumber DIPA Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp4.675.871.795.073 atau mencapai 97,16% dari total pagu sebesar Rp4.812.589.293.000. Persentase realisasi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 98,78%. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2018-2020 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3. 16 Alokasi dan Realisasi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2018 s.d 2020



Sumber: SMART DJA Kemenkeu Tahun 2020

Tabel 3. 5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Persatker Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

No	Satker	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Dit PAUD	276.589.141.000	271.705.498.611	98,23%
2	Dit SD	766.407.740.000	750.973.875.246	97,99%
3	Dit SMP	1.049.439.954.000	1.040.334.172.094	99,13%
4	Dit SMA	414.850.543.000	399.381.100.896	96,27%
5	Dit PMPK	567.004.298.000	557.129.526.070	98,26%
6	SETDITJEN	252.090.923.000	246.192.730.131	97,66%
7	LPMP	961.951.750.000	907.292.923.754	94,32%
8	BP/PP PAUD	384.446.131.000	363.690.903.844	94,60%
9	Dit SMK	139.808.813.000	139.171.064.427	99,54%
TOTAL		4.812.589.293.000	4.675.871.795.073	97,16%

Efisiensi Anggaran dengan menggunakan rumusan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) capaian Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen sebesar 19,18%, ini dihasilkan dari perbandingan antara realisasi anggaran sebesar 97,16% dengan capaian sasaran program dan capaian keluaran program sebesar 100% mendapatkan Nilai Efisiensi dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 6 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

Unit Eselon I	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Rata-rata Nilai Kinerja Satker	Nilai Kinerja Unit Eselon I
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	100	97,16	96,31	100	19,18	97,08	98,28

sumber data: monev.anggaran.kemdikbud.go.id

Sementara untuk efisiensi berdasarkan penggunaan anggaran, seluruh output berhasil mencapai target dengan menggunakan jumlah anggaran berdasarkan PAGU yang telah ditetapkan, hanya satu output yang tidak mencapai target yaitu pada Dit. PAUD output Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas (Lembaga).

Berdasarkan penggunaan anggaran tersebut terjadi efisiensi pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebesar Rp. 136,717,497,927 dari total anggaran Rp. 4.812.589.293.000 atau sebesar 2,84%.

Terdapat pula efisiensi capaian fisik yang berhasil dilakukan oleh unit-unit Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen diantaranya:

1. Direktorat PAUD, berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.999.191.000 dari 11 output teknis dari kegiatan pertemuan langsung menjadi daring, juga pada bantuan RKB sebesar Rp. 4.200.000.000 dan rehab/renov sebesar 927.400.000 tanpa mengurangi target awal. Anggaran hasil efisiensi ini digunakan untuk kegiatan prioritas terutama dalam hal mengatasi pandemi, antara lain:
 - a. Bantuan implementasi program kesiapan bersekolah bagi satuan 4.432 PAUD sebesar Rp. 33.240.000.000;
 - b. Pengadaan masker dan hand sanitizer 2.031 paket sebesar Rp. 4.185.891.000;
 - c. Penggandaan dan pengiriman buku materi penguatan pendidik 1 paket sebesar Rp. 3.956.300.000;
 - d. Pembuatan video animasi 12 paket buku bahan ajar bagi pendidik dan 30 paket buku bagi orangtua serta e-book sebesar Rp. 2.385.000.000;
 - e. Pengadaan jasa pengiriman buku-buku PAUD 1 paket sebesar 4.232.000.000.
2. Direktorat SMP melakukan efisiensi dengan beberapa capaian fisik yang melebihi target, antara lain:
 - a. Sekolah yang direnovasi dengan anggaran Rp. 10.645.274.000 menghasilkan capaian fisik 21 sekolah dari target 20 sekolah;
 - b. Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 258.598.082.000 menghasilkan capaian fisik 5.222 paket dari target 1.471 paket;
 - c. Sekolah terbuka yang mendapatkan bantuan operasional dari anggaran Rp. 16.8999.900.000 menghasilkan capaian fisik 219 sekolah dari target 200 sekolah.
3. Direktorat PMPK melakukan efisiensi dengan beberapa capaian fisik yang melebihi target, yaitu siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan dengan anggaran sebesar Rp. 232.372.233.000 menghasilkan capaian fisik 154.481 siswa dari target 135.581 siswa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang dilakukan terhadap ketercapaian IKP Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen pada tahun anggaran 2020 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 16 Indikator Kinerja Program (IKP) pada 6 Sasaran Program, 12 IKP telah mencapai target, 2 IKP tidak mencapai target, dan 2 IKP belum memiliki target. Terdapat 2 indikator yaitu persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan dan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum yang belum memenuhi target.
2. Dalam Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020 – 2024, ada 2 indikator kinerja program yang belum tepat dalam menentukan target, sehingga capaiannya jauh melebihi target yaitu indikator Persentase Satuan Pendidikan Yang Memperoleh BOS Dan Melaporkannya Tepat Waktu dan indikator Persentase Satuan Pendidikan Yang Melakukan Penerapan BOS-Non-Tunai.
3. Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020 – 2024, dan terdapat beberapa indikator baru yang belum bisa dilaksanakan pengukurannya tahun 2020 ini. Untuk mengukur capaian indikator ini digunakan pendekatan menggunakan data-data yang terkait seperti dari rapor mutu sekolah, nilai ujian nasional dan nilai AKSI.
4. Pada triwulan I tahun 2020 ini terjadi pandemic Covid 19, maka berdasarkan Inpres No. 54 Tahun 2020, seluruh Kementerian dan Lembaga diminta untuk melakukan refocusing anggaran tahun 2020. Beberapa perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi ini seperti kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka dirubah menjadi melalui dalam jaringan (daring). Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan diawal tahun.
5. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2024 disusun berdasarkan Sasaran Program yang telah disusun menurut Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, namun demikian karena penyusunannya tidak bersamaan waktunya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran maka menimbulkan sebagian output atau kegiatan yang direncanakan dalam dokumen penganggaran belum sepenuhnya mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra;

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perbaikan renstra 2020-2024 untuk memwadahi penyesuaian indikator yang terjadi.
2. Perlu ada review dan penyesuaian besaran target pada indikator yang capaiannya terlalu besar, agar pada tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan capaian yang telah dicapai pada tahun ini.

3. Terhadap Indikator Kinerja Program pada tahun 2020 yang belum melakukan pengukuran, agar unit kerja yang berwenang dapat melaksanakan pengukuran di tahun 2021 sehingga capaian indikator kinerja program ini dapat diukur sesuai definisi operasional.
4. Untuk indikator yang belum mencapai target, langkah yang ditempuh adalah meningkatkan kinerja dalam metode pencapaian target.
5. Perlu dilakukan reviu Renstra secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indicator yang didukung dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam reviu ini selalu mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun sampai dengan target akhir Renstra dapat lebih mudah dicapai.

LAMPIRAN

A. Dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani (PK awal dan PK revisi);


Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAMID MUHAMMAD
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Juni 2020
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,


NADIEM ANWAR MAKARIM


HAMID MUHAMMAD

TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	2	3	4
SP3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	IKP3.1.1 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	66,49%
		IKP3.1.2 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	6 kab/kota
		IKP3.1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	6 provinsi
SP3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	IKP3.2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	-
		IKP3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	-
SP3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	IKP3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	58,70%
		IKP3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	57,20%
		IKP3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26,50%
SP3.4	Meningkatnya karakter peserta didik	IKP3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	30,00%
		IKP3.4.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	57,20%
SP3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	IKP3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	50,00%
		IKP3.5.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	1,80%
		IKP3.5.3 Persentase prov / kab / kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	55,00%
		IKP3.5.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,00%
SP3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas	IKP3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB	Predikat BB
		IKP3.6.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	11 satker

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (dalam ribuan)
1	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 294.274.096
2	Layanan Sekolah Dasar	Rp. 996.993.020
3	Layanan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 843.969.207
4	Layanan Sekolah Menengah Atas	Rp. 451.067.099
5	Layanan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Rp. 580.711.049
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 296.681.335
7	Layanan Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan untuk seluruh Jenjang Pendidikan	Rp. 1.045.472.807
8	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	Rp. 420.659.979

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


NADIEM ANWAR MAKARIM

Jakarta, Juni 2020
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,


HAMID MUHAMMAD



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN
dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

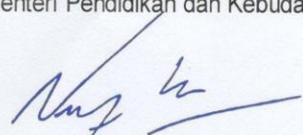
Nama : Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal PAUD,
DIKDAS, dan DIKMEN


Jumeri, S.TP.,M.Si.



2009140908182

1/3

Halaman 1 dari 3

TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	1.1 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	66,49
		1.2 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	6
		1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	6
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	2.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	58,68
		2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2
		2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5
3	Meningkatnya karakter peserta didik	3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30
		3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	57,2
4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	50
		4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	1,8
		4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	55
		4.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95
5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas	5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB	predikat	BB
		5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	11

KEGIATAN DAN ANGGARAN

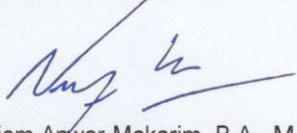
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	1.074.990.035.000
2	2003	Pembinaan Sekolah Dasar	775.972.192.000



2009140908182

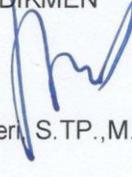
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	297.917.439.000
4	4272	Penyediaan Layanan PAUD	294.274.096.000
5	4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	414.159.979.000
6	5626	Layanan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	580.711.049.000
7	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	451.067.099.000
8	5628	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	139.808.813.000
9	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	1.040.736.703.000
TOTAL			5.069.637.405.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS,
dan DIKMEN



Jumeri, S.TP., M.Si.



2009140908182

3/3

Halaman 3 dari 3

B. Realiasi Anggaran Satker Peroutput Tahun 2021

KODE	SATKET/OUTPUT	SASARAN			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA
4272	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini				276.589.141.000	271.705.498.611	98,23	4.883.642.389
4272.002	Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) (Lembaga)	410	410	100	10.924.840.000	10.894.941.014	99,73	29.898.986
4272.004	Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD (Lembaga)	149	169	113,42	28.158.530.000	27.914.903.313	99,13	243.626.687
4272.005	Kabupaten/Kota Mengimplementasikan SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Daerah)	320	320	100	52.576.237.000	51.841.044.638	98,60	735.192.362
4272.006	Lembaga PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif (Lembaga)	6.000	6.000	100	18.605.033.000	18.511.810.274	99,50	93.222.726
4272.008	Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas (Lembaga)	8.309	8.309	100	37.203.907.000	35.940.748.121	96,60	1.263.158.879
4272.009	Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas (Lembaga)	564	510	90,43	15.264.598.000	14.490.224.386	94,93	774.373.614
4272.010	Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD (Dokumen)	35	35	100	6.331.768.000	6.315.072.600	99,74	16.695.400
4272.011	Lembaga PAUD Percontohan yang Dibangun/Direvitalisasi (Lembaga)	15	16	106,67	18.144.795.000	18.108.580.361	99,80	36.214.639
4272.012	Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi (Lembaga)	234	243	103,85	28.568.760.000	28.482.308.423	99,70	86.451.577
4272.013	Anak Usia Dini Mendapatkan Layanan PAUD Inklusif (Anak)	7.000	7.000	100	13.597.595.000	13.299.073.550	97,80	298.521.450
4272.014	Anak PAUD yang dinilai Tingkat Pencapaian Perkembangannya (Anak)	20.000	20.000	100	16.936.140.000	16.734.331.331	98,81	201.808.669
4272.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	3	3	100	3.139.450.000	3.136.042.429	99,89	3.407.571
4272.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	5	5	100	13.278.483.000	13.217.834.313	99,54	60.648.687
4272.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	13.859.005.000	12.818.583.858	92,49	1.040.421.142
2003	Direktorat Sekolah Dasar				766.407.740.000	750.973.875.246	97,99	15.433.864.754
2003.001	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Siswa)	1.655.308	1.655.308	100	373.441.612.000	373.400.564.497	99,99	41.047.503
2003.002	Unit Sekolah Baru Yang dibangun (Unit)	6	6	100	11.561.350.000	11.253.523.650	97,34	307.826.350
2003.007	Sekolah yang Direnovasi (SEKOLAH)	1	1	100	1.606.398.000	1.291.853.450	80,42	314.544.550
2003.013	Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan (Sekolah)	514	514	100	17.850.533.000	15.945.598.825	89,33	1.904.934.175
2003.017	Sekolah yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler (Sekolah)	12.708	12.708	100	27.853.250.000	26.640.026.593	95,64	1.213.223.407
2003.018	Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Sekolah)	514	514	100	8.757.990.000	7.242.138.440	82,69	1.515.851.560
2003.020	Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan (Paket)	2.330	2.330	100	226.897.915.000	223.899.110.010	98,68	2.998.804.990
2003.022	Sekolah Yang Melaksanakan Program UKS (Sekolah)	800	800	100	19.658.884.000	19.156.408.371	97,44	502.475.629
2003.091	Sekolah Yang Mendapatkan Layanan Khusus (Sekolah)	313	313	100	18.855.313.000	18.592.996.558	98,61	262.316.442
2003.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100	1.310.000.000	1.307.915.000	99,84	2.085.000
2003.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	3	3	100	30.550.262.000	26.872.049.858	87,96	3.678.212.142

KODE	SATKET/OUTPUT	SASARAN			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA
2003.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	28.064.233.000	25.371.689.994	90,41	2.692.543.006
2000	Direktorat Sekolah Menengah Pertama				1.049.439.954.000	1.040.334.172.094	99,13	9.105.781.906
2000.001	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Siswa)	952.681	952.681	100	357.726.876.000	357.515.169.100	99,94	211.706.900
2000.002	Unit Sekolah Baru Yang dibangun (Unit)	1	1	100	380.710.000	380.710.000	100,00	-
2000.007	Sekolah yang Direnovasi (SEKOLAH)	20	20	100	10.645.484.000	10.645.271.728	100,00	212.272
2000.013	Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan (Sekolah)	1.603	1.603	100	11.886.800.000	11.872.853.595	99,88	13.946.405
2000.017	Sekolah Yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler (Sekolah)	4.689	4.689	100	16.871.692.000	16.602.981.100	98,41	268.710.900
2000.018	Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Sekolah)	1.603	1.603	100	44.555.322.000	42.435.534.871	95,24	2.119.787.129
2000.020	Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan (Paket)	5.222	5.222	100	505.420.031.000	505.405.066.379	100,00	14.964.621
2000.022	Sekolah Memiliki UKS Sesuai Standar Pelayanan (Sekolah)	514	514	100	1.649.207.000	1.579.894.300	95,80	69.312.700
2000.033	Sekolah Terbuka Yang Mendapatkan Bantuan Operasional (Sekolah)	200	200	100	16.899.900.000	15.428.722.374	91,29	1.471.177.626
2000.091	Sekolah Yang Mendapatkan Layanan Khusus (Sekolah)	395	395	100	23.989.298.000	21.242.629.953	88,55	2.746.668.047
2000.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100	5.233.860.000	5.233.856.050	100,00	3.950
2000.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	100	25.067.275.000	24.815.350.153	99,00	251.924.847
2000.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	12	12	100	29.113.499.000	27.176.132.491	93,35	1.937.366.509
5627	Direktorat Sekolah Menengah Atas				414.850.543.000	399.381.100.896	96,27	15.469.442.104
5627.001	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Siswa)	268.808	268.808	100	135.631.064.000	135.507.018.464	99,91	124.045.536
5627.002	Unit Sekolah Baru Yang dibangun (Unit)	1	1	100	260.365.000	254.436.900	97,72	5.928.100
5627.007	Sekolah Yang Direnovasi (Paket)	132	132	100	67.672.645.000	67.405.690.596	99,61	266.954.404
5627.013	Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan (Sekolah)	650	650	100	28.835.058.000	26.595.051.683	92,23	2.240.006.317
5627.017	Sekolah yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler (Sekolah)	650	650	100	40.708.320.000	35.780.814.666	87,90	4.927.505.334
5627.018	Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Sekolah)	34	34	100	16.853.142.000	14.582.165.215	86,52	2.270.976.785
5627.022	Sekolah Yang Melaksanakan Program UKS (Sekolah)	100	100	100	889.000.000	808.940.086	90,99	80.059.914
5627.025	Sekolah Terbuka Yang Mendapatkan Bantuan Operasional (Sekolah)	7	7	100	5.063.800.000	4.981.580.350	98,38	82.219.650
5627.091	Sekolah Yang Mendapatkan Layanan Khusus (Sekolah)	470	470	100	48.942.549.000	48.321.529.806	98,73	621.019.194
5627.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100	2.491.835.000	2.320.250.900	93,11	171.584.100
5627.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	100	46.130.412.000	41.889.755.428	90,81	4.240.656.572
5627.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	21.372.353.000	20.933.866.802	97,95	438.486.198
5626	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus				567.004.298.000	557.139.126.070	98,26	9.865.171.930
5626.002	Unit Sekolah Baru Yang dibangun (Unit)	3	3	100	11.357.136.000	11.348.440.800	99,92	8.695.200

KODE	SATKET/OUTPUT	SASARAN			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA
5626.007	Sekolah yang Direnovasi (SEKOLAH)	1	1	100	7.455.999.000	7.454.649.000	99,98	1.350.000
5626.013	Sekolah yang mendapat Pembinaan (sekolah)	2.259	2.259	100	14.603.429.000	13.860.400.310	94,91	743.028.690
5626.020	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan (sekolah)	233	252	108,15	19.926.944.000	19.870.956.100	99,72	55.987.900
5626.032	Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial (sekolah)	40	40	100	1.796.360.000	1.515.049.726	84,34	281.310.274
5626.033	Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan (siswa)	135.581	154.481	114	232.850.702.000	231.540.486.965	99,44	1.310.215.035
5626.034	Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus (siswa)	2.895	2.895	100	103.965.317.000	103.169.903.968	99,23	795.413.032
5626.037	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif (Sekolah)	500	500	100	5.074.893.000	4.933.339.997	97,21	141.553.003
5626.042	Sekolah Memiliki UKS Sesuai Standar Pelayanan (Sekolah)	34	34	100	532.580.000	509.029.850	95,58	23.550.150
5626.044	Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (Orang)	514	514	100	35.773.341.000	34.925.799.344	97,63	847.541.656
5626.045	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan (Orang)	88.000	92.600	105,23	75.503.899.000	71.931.316.082	95,27	3.572.582.918
5626.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100	8.569.000.000	8.525.165.218	99,49	43.834.782
5626.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	100	16.642.698.000	16.020.086.832	96,26	622.611.168
5626.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	32.952.000.000	31.534.501.878	95,70	1.417.498.122
2005	Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen				252.090.923.000	246.192.730.131	97,66	5.898.192.869
2005.001	Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina (Lembaga)	532	532	100	645.270.000	644.914.090	99,94	355.910
2005.004	Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya (Daerah)	34	34	100	2.141.725.000	2.094.344.200	97,79	47.380.800
2005.010	Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan (Sekolah)	13	13	100	1.786.880.000	1.633.398.000	91,41	153.482.000
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	1	1	100	191.930.205.000	187.930.837.801	97,92	3.999.367.199
2005.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100	12.152.746.000	11.304.441.067	93,02	848.304.933
2005.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	43.434.097.000	42.584.794.973	98,04	849.302.027
5630	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan				961.951.750.000	907.292.923.754	94,32	54.658.826.246
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya (Sekolah)	216.924	216.924	100	13.377.096.000	11.514.801.814	86,08	1.862.294.186
5630.002	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP (Sekolah)	214.312	214.312	100	52.191.286.000	47.066.621.696	90,18	5.124.664.304
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (Sekolah)	15.944	15.944	100	91.168.275.000	82.757.165.907	90,77	8.411.109.093
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya (Sekolah)	216.974	216.974	100	39.503.056.000	34.792.316.727	88,08	4.710.739.273
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	36	36	100	123.004.416.000	119.420.077.362	97,09	3.584.338.638
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	34	34	100	93.472.599.000	83.360.842.204	89,18	10.111.756.796
5630.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	67	67	100	549.235.022.000	528.381.098.044	96,20	20.853.923.956
4273	Balai/Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat				384.446.131.000	363.690.903.844	94,60	20.755.227.156
4273.001	Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan (Naskah)	171	171	100	33.273.017.000	30.886.492.406	92,83	2.386.524.594
4273.002	Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional (Lembaga)	17.083	17.083	100	72.132.050.000	70.290.112.413	97,45	1.841.937.587

KODE	SATKET/OUTPUT	SASARAN			ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA
4273.003	SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Orang)	11.475	11.475	100	19.306.007.000	18.552.599.543	96,10	753.407.457
4273.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	29	29	100	43.409.952.000	40.849.417.656	94,10	2.560.534.344
4273.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	29	29	100	29.657.622.000	27.068.349.104	91,27	2.589.272.896
4273.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	29	29	100	186.667.483.000	176.043.932.722	94,31	10.623.550.278
5628	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan				139.808.813.000	139.171.064.427	99,54	637.748.573
5628.001	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Siswa)	257.692	257.692	100	130.019.078.000	129.483.798.816	99,59	535.279.184
5628.013	Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan (Sekolah)	1	1	100	19.353.000	18.902.900	97,67	450.100
5628.016	Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade (Siswa)	1	1	100	40.000.000	40.000.000	100,00	-
5628.019	Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku (Sekolah)	1	1	100	519.387.000	429.677.800	82,73	89.709.200
5628.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	9.210.995.000	9.198.684.911	99,87	12.310.089
TOTAL					4.812.589.293.000	4.675.881.395.073	97,16	136.707.897.927

B. Dokumentasi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Webinar BOS Reguler

Tanggal 27 Agustus 2020



Sarasehan Literasi Sekolah #8

Tanggal 12 September 2020

Sarasehan Literasi Sekolah #8
Penguatan Literasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

7.600 x ditonton

493 9 BAGIKAN SIMPAN

Ditjen PAUD Dikdasmen

Top chat replay

- CIKUKUL HADIR
- Kusri Muryati kusri SDN RAWADENOK DEPOK, HADIR
- Sri Wahyuningsih SRIWAHYUNINGSIH, PP-PAUD &DIKMAS JABAR HADIR
- Ellen Livia ELLEN LIVIA @LPMP Lampung
- Dr. Wayan Mudlami hadir dan menyimak
- As Asma hadir
- Nurtetti Sihotang Nurtetti Sihotang,S.Pd, Guru SMP Bintang Timur Pematangsiantar HADIR dan Menyimak
- rohmatu shoumiyah hadir
- Erni Sukmawati Dewi ERNI SUKMAWATI DEWI, PP PAUD DAN DIKMAS JAWA BARAT...menyimak
- Animan Purba semoga sukses pelaksanaan sarasehan Literasi sekolah (UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua-Deli Serdang- Provinsi Sumatera, Horas...
- marif junaidi hadir
- suyanto spd UPT SDN 276 GRESIK JAWATIMUR HADIR
- Rahma Lina Hadir dan menyimak

Sarasehan Literasi Sekolah #8
Penguatan Literasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

7.600 x ditonton

493 9 BAGIKAN SIMPAN

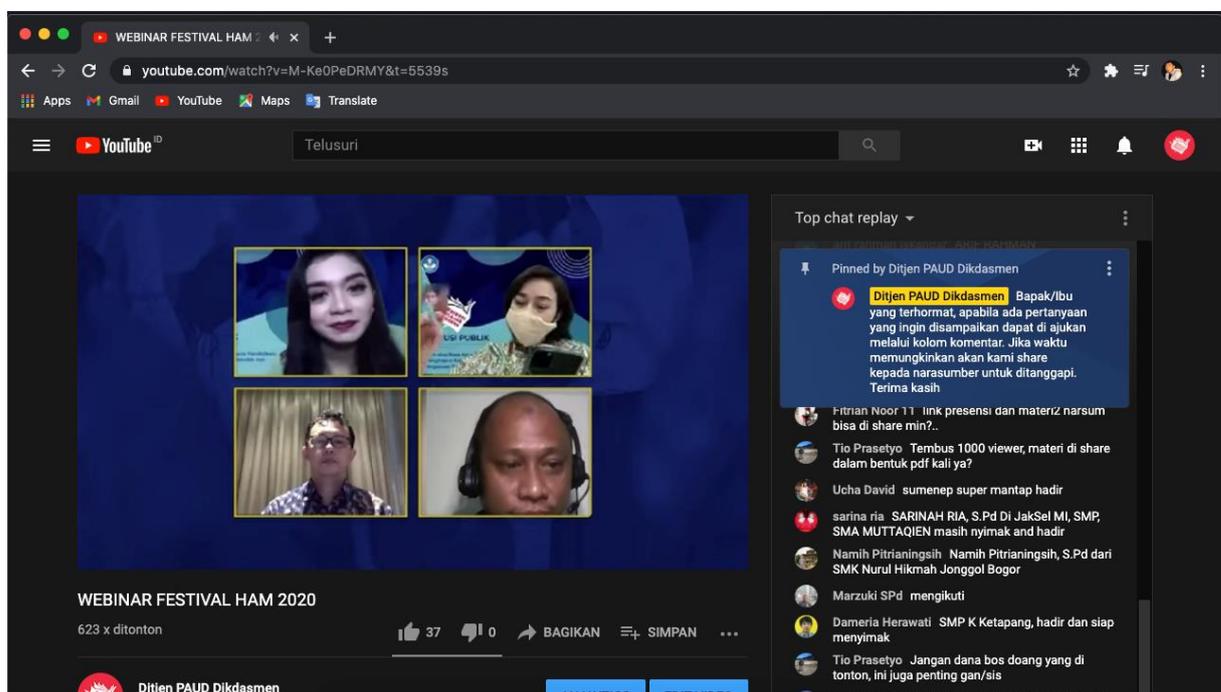
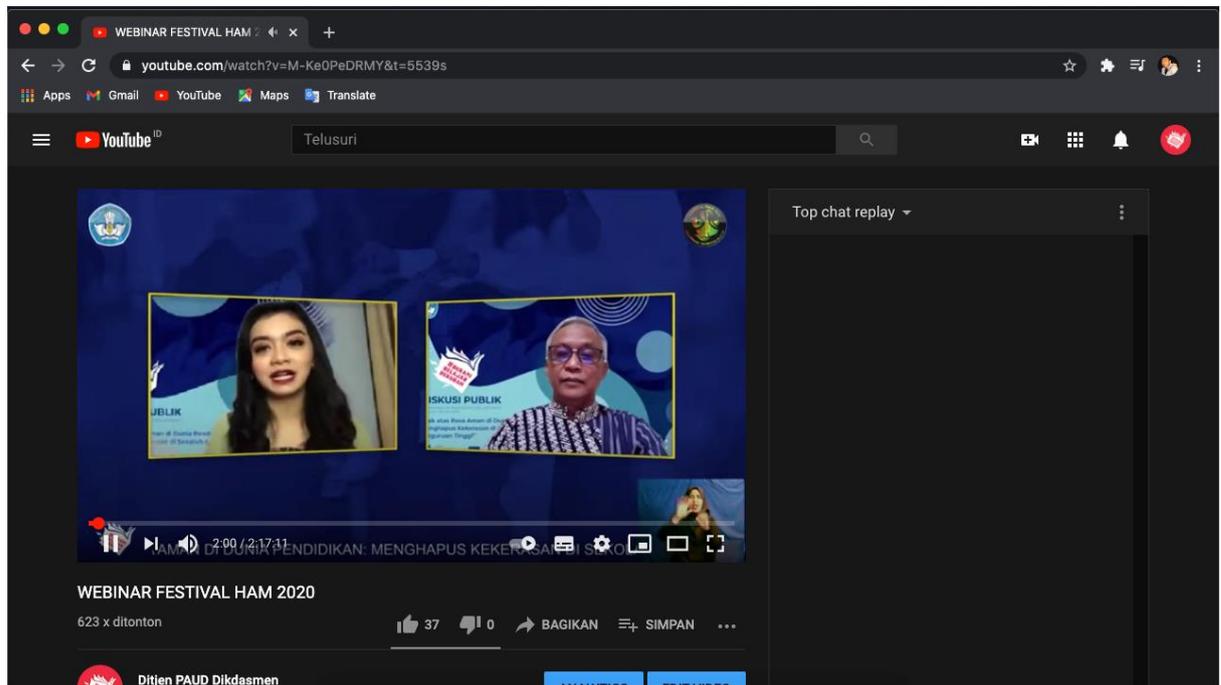
Ditjen PAUD Dikdasmen
13.9 rb subscriber

Top chat replay

- Resliana Tinambunan Resliana Tinambunan hadir dan menyimak
- Nani Sulyani Nani Sulyani, SMPN 3 kab. Bandung Barat. hadir
- Istichomah nyimak
- Diana Event nice to hear ,from Solok Sumatera barat 🙏
- Sugeng Priono Sugeng Priono, Pengawas SMK Kab. Siak Prov. Riau lagi menyimak penjelasan
- siti jamilah Materinya sangat bagus. Siti Jamilah(Penilik Paud JAKarta Utara) ..masih menyimak
- Nia Yusnia nia yusifa, sdn parung bingung 01 depok, hadir
- Harmani Mtq mengikuti dari gubug grobogan
- Endang Setiaryni Masih menyimak
- AGUSTINUS DAMANIK Agustinus Damanik, Kepala Sekolah SMPN 1 Bangun Purba, kab Deli Serdang, hadir dan menyimak
- Slam Pri Slamet Priyanto, SMP N 2 Toroh menyimak
- Ririn Widayahrini hadir ..
- Rohmad Sono Pengawas Kab. Temanggung

WEBINAR FESTIVAL HAM 2020

Tanggal 18 Desember 2020



Webinar Peran TP UKS/M dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2020

Webinar Peran TP UKS/M
Dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
"UKS/M Kuat, Peserta Didik Sehat, Cerdas, Berkarakter"
TANGGAL: 29 Desember 2020 | 08.00 - Selesai WIB
#SahabatDikbud #BeraniBelajarBerubah #MerdekaBelajar
Webinar Peran TP UKS/M dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka 2021
7.810 x ditonton

Webinar Peran TP UKS/M dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka 2021
7.810 x ditonton

Kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Sinkronisasi Dapodik



Foto Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19
SMP Negeri 2 Cianjur





Stay at home
PAT hari ke -2
Kelas 7.8 (STEVA)

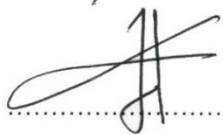


PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020 yang disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Reviu ini bertujuan untuk menyajikan laporan kinerja yang akurat, andal dan valid.

Jakarta, Januari 2021

Tim Reviu LAKIP:

- | | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | Dody Wahyu Priyambodo | Analisis Kebijakan Ahli Madya) | 
..... |
| 2. | Katman | Perencana Ahli Muda | 
..... |
| 3. | Any Sayekti | Perancang Peraturan | 
..... |
| 4. | Hayun Kusumah | Penyusun Perencanaan Anggaran (Satuan Pengawas Internal) | 
..... |

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

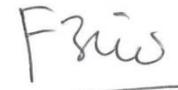
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021

Pengendali Mutu



Fauziah

NIP 196107301988022001



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH**